

**TINGKAT KETERSEDIAAN DAN MANFAAT PENYEDIAAN
PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DI KELURAHAN
GAMBESI KECAMATAN TERNATE SELATAN
KOTA TERNATE**



SKRIPSI

Oleh :

SOFYAN S.HI ABD RAHMAN
45 04 042 039



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA "45"
MAKASSAR
2015**

**TINGKAT KETERSEDIAAN DAN MANFAAT PENYEDIAAN
PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DI KELURAHAN
GAMBESI KECAMATAN TERNATE SELATAN
KOTA TERNATE**

SKRIPSI

Oleh :

**Sofyan S.Hi Abd Rahman
45 04 042 039**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA "45"
MAKASSAR
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

TINGKAT KETERSEDIAAN DAN MANFAAT PENYEDIAAN
PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DI KELURAHAN
GAMBESI KECAMATAN TERNATE SELATAN
KOTA TERNATE

SOFYAN S.HI. ABD RAHMAN

45 04 042 039

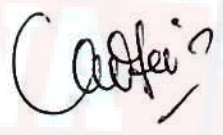
Disetujui Komisi Pembimbing



Pembimbing I

Pembimbing II



Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN 09 17076801


Ir. Jufriadi, MSP
NIDN 0931016802

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Teknik Universitas "45"


Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si
NIDN 0917087102

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Ir. H. Syamsuddin. Margolang, M.Si
NIDN 0909015501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SOFYAN S. HI. ABD. RAHMAN.**
Nomor Induk Mahasiswa : **45 04 042 039**
Program Studi : **Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/ sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2015.

Yang menyatakan,

Sofyan S. Hi. Abd. Rahman.



ABSTRAK

Sofyan S. Hi. Abd. Rahman. Tingkat Ketersediaan dan Manfaat Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate. (dibimbing oleh Rudi Latief dan Jufriad)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar tingkat ketersediaan dan manfaat prasarana dan sarana permukiman di Kelurahan Gambesi dan manfaat terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakatnya. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui hasil analisis statistik dan di sajikan dalam bentuk tabel, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau Kepala Keluarga yang bermukim di satu lokasi sampel penelitian yaitu Kelurahan Gambesi.

Pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling kemudian dilakukan pengambilan responden secara Cluster Random Sampling di dua lokasi sampel sebanyak 104 responden. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kualitatif dengan tabel frekwensi dan perbandingan terhadap standard NSPM. Hasilnya menunjukkan bahwa ketersediaan dan manfaat penyediaan prasarana dan sarana permukiman seperti komponen jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi lingkungan terhadap indikator standard kebutuhan masih kurang baik dan kurang memadai sementara manfaat ketersediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat sangat bermanfaat untuk peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan serta terjalinnya interaksi sosial di masyarakat dengan adanya prasarana tersebut. Olehnya itu melalui program-program pemerintah baik pusat maupun daerah harus tetap berkelanjutan dan berkesinambungan serta melibatkan masyarakat lokal baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

Kata Kunci : Prasarana Dan Sarana, Ketersediaan, Ekonomi, Serta Interaksi Sosial.



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian hingga penulisan skripsi dengan judul **"Tingkat Ketersediaan Dan Manfaat Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pemukiman Di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate"**. merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas "45" Makassar.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate.

Skripsi ini berhasil dirampungkan memang bukanlah suatu karya yang besar tetapi masih dapat dibanggakan oleh penulis sendiri dan penulis menyadari skripsi ini tidak akan berhasil tersusun tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung baik itu berupa materi maupun moral serta ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman, untuk itu melalui lembar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Rudi Latief, M.Si, sebagai Pembimbing I, Bapak Ir. Jufriadi, MSP sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan dorongan selama penyusunan tugas akhir ini.

2. Bapak Dekan Fakultas Teknik, para Pembantu Dekan beserta staf Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Ketua Jurusan, Dosen dan staf Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
4. Staf pada Kantor BPS Kota Temate, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kantor Camat Temate Selatan serta Kantor Lurah Gambesi yang telah memberikan data dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tak lupa pula kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sempat disebut satu per satu, penulis memaparkan doa kiranya bernilai ibadah disisi Allah S.W.T.

Saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan, demi kesempurnaan penulisan naskah dimasa akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Pebruari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

PRAKATA i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Batasan Masalah 5

F. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Permukiman Kumuh 8

B. Peranan Pemerintah dalam Penataan Permukiman 9

C. Konsep Lingkungan Permukiman yang Ideal 12

D. Prasarana Lingkungan Permukiman 16

1. Jalan 17

2. Air Bersih 19

3. Air Limbah 21

4. Prasarana Persampahan 23

5. Drainase 24

E. Prasarana Sosial Ekonomi 26

F. Kerangka Pikir 27



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian.....	29
B. Sumber Data	29
1. Data Primer.....	29
2. Data Sekunder.....	30
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36

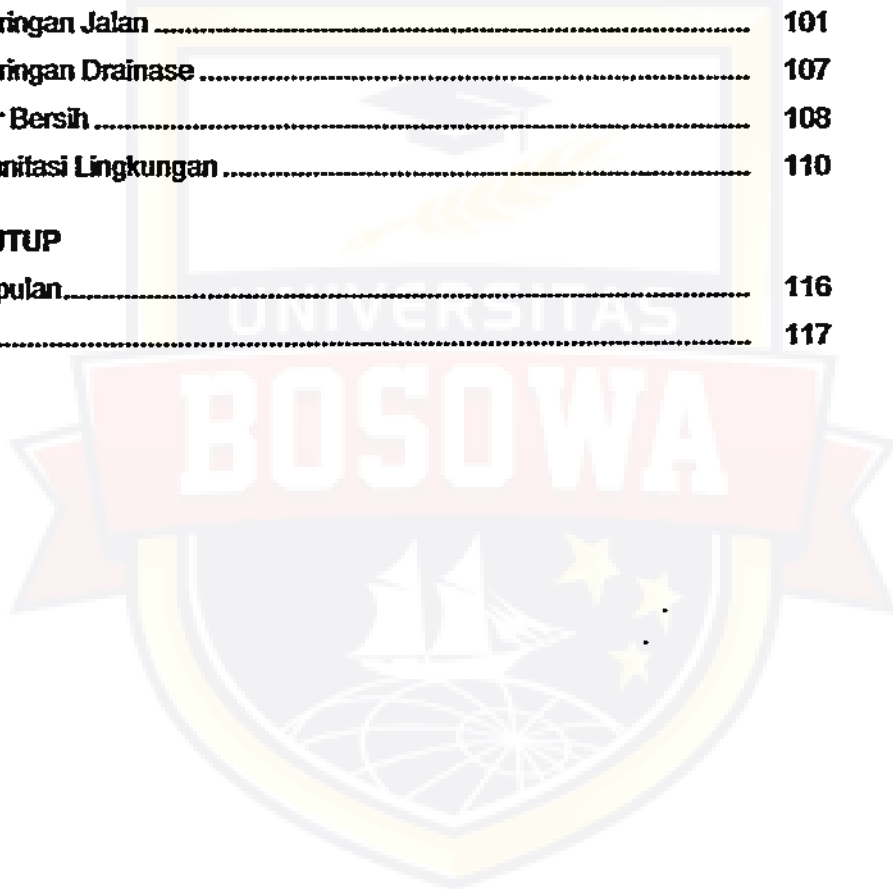
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Profil Wilayah Kota Temate Provinsi Maluku Utara.....	47
2. Profil Wilayah Kecamatan Temate Selatan.....	53
3. Profil Kelurahan Gambesi	56
a. Geografis.....	56
b. Keadaan Iklim	57
c. Topografi.....	57
d. Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian	57
e. Potensi Sumber Daya Alam	59
f. Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi.....	59
4. Tinjauan Khusus Lingkungan Kawasan Kelurahan Gambesi sebagai Lokasi Kegiatan Penelitian.....	68

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketersediaan Dan Manfaat Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pemukiman Di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate	75
1. Deskripsi Identitas Responden	75

2. Kondisi Sosial Ekonomi Responden	78
3. Analisis Ketersediaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Gambesi	82
a. Jalan	82
b. Sistem Drainase	87
c. Jaringan Air Bersih	90
d. Sistem Sanitasi Lingkungan	92
B. Manfaat Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat	101
1. Jaringan Jalan	101
2. Jaringan Drainase	107
3. Air Bersih	108
4. Sanitasi Lingkungan	110
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Klasifikasi Jalan	19
Tabel 3.1. Rukun Tangga dan Penduduk Menurut RW di Kelurahan Gambesi Tahun 2013.....	32
Tabel 3.2. Indikator dan Cara Pengukuran Variabel Penelitian.....	35
Tabel 4.1. Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Temate 2013	48
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Temate Menurut Jenis Kelamin di Kota Temate Tahun 2013.....	51
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk, Luas, dan Jarak dari Ibukota Kecamatan di Kecamatan Temate Selatan 2013	55
Tabel 4.4. Jumlah RW dan RT di Kelurahan Gambesi.....	56
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk berdasarkan RW dan RT di Kelurahan Gambesi	58
Tabel 4.6. Jumlah Rumah di Kelurahan Gambesi menurut Lingkungan/RW.....	61
Tabel 4.7. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Gambesi	62
Tabel 4.8. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Gambesi.....	63
Tabel 4.9. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Gambesi.....	64
Tabel 4.10. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Gambesi Menurut Jumlah Lingkungan/RW.....	68
Tabel 4.11. Jenis Jalan, Lebar, Konstruksi, dan Kondisi Jalan Kelurahan Gambesi	69
Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	75

Tabel 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur	76
Tabel 5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pokok.....	78
Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan	80
Tabel 5.6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	80
Tabel 5.7. Standard Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Jaringan Jalan Bidang Pemukiman.....	83
Tabel 5.8. Perbandingan Antara Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak dengan Standard SPM	84
Tabel 5.9. Penilaian Masyarakat Terhadap Kondisi Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak.....	84
Tabel 5.10. Perbandingan Antara Lebar Badan Jalan dan Perkerasan Jalan dengan Standard SPM Tahun 2007	85
Tabel 5.11. Penilaian Masyarakat Terhadap Kondisi Lebar Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak.....	86
Tabel 5.12. Material Permukaan Jaringan Jalan di Lokasi Penelitian	87
Tabel 5.13. Perbandingan Antara Panjang Jaringan Drainase dengan Standard SPM	87
Tabel 5.14. Perbandingan Lebar Sistem Drainase Terhadap Standard SPM.....	89
Tabel 5.15. Perbandingan Dalam/Tinggi Sistem Drainase Terhadap Standard SPM	89

Tabel 5.16. Penilaian Masyarakat terhadap Ketersediaan Jaringan Drainase	
Berdasarkan pada Lebar dan Tinggi Drainase	90
Tabel 5.17. Klasifikasi Sumber Air Bersih di Kelurahan Gambesi	91
Tabel 5.18. Klasifikasi Ketersediaan Sumber Air Bersih di Lokasi Penelitian	91
Tabel 5.19. Klasifikasi Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi	
Penelitian	93
Tabel 5.20. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi	
Penelitian	94
Tabel 5.21. Klasifikasi Ketersediaan Pembuangan Limbah Padat di Lokasi	
Penelitian	95
Tabel 5.22. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Padat di Lokasi	
Penelitian	95
Tabel 5.23. Klasifikasi Ketersediaan MCK Umum di Lokasi Penelitian	96
Tabel 5.24. Tingkat Ketersediaan MCK Umum di Lokasi Penelitian	97
Tabel 5.25. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi	
Penelitian	98
Tabel 5.26. Standard Peralatan dan Kapasitas Pelayanan Persampahan.....	99
Tabel 5.27. Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan	102
Tabel 5.28. Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan	103
Tabel 5.29. Waktu yang di Gunakan ke tempat Kerja.....	104
Tabel 5.30. Manfaat Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kegiatan sosial	
Responden	105



Tabel 5.31. Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Tingkat Pendapatan	106
Tabel 5.32. Rata-Rata Pemakaian Air/hari dari Responden	109
Tabel 5.33. Tanggapan Responden Yang Pernah Diserang Penyakit Terhadap Kualitas Air.....	110
Tabel 5.34. Sistem Pembuangan Limbah Cair dan Padat di Lokasi Penelitian	111
Tabel 5.35. Penilaian Responden Terhadap Kondisi MCK Umum.....	112
Tabel 5.36. Alasan Sehingga Belum Memiliki MCK Sendiri dari Responden.....	113
Tabel 5.37. Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Sampah	115



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	28
Gambar 3.1. Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota	47
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Temate.....	49
Gambar 4.2. Peta Administrasi Temate Selatan.....	54
Gambar 4.3. Fasilitas Pendidikan Universitas Khairun Temate di Gambesi.....	63
Gambar 4.4. Puskesmas dan Posyandu di Kelurahan Gambesi.....	64
Gambar 4.5. Mesjid dan Mushollah di Kelurahan Gambesi.....	65
Gambar 4.6. Kantor Kelurahan dan Lapangan Bola di Gambesi.....	65
Gambar 4.7. Peta Administrasi Kelurahan Gambesi.....	67
Gambar 4.8. Kondisi Jaringan Jalan di Kelurahan Gambesi	70
Gambar 4.9. Kondisi Jaringan Drainase Kelurahan Gambesi	71
Gambar 4.10. Skema persampahan di Kelurahan Gambesi	74
Gambar 5.1. Distribusi pekerjaan Pokok Masyarakat	80
Gambar 5.2. Kondisi Eksisting berdasarkan Pada Sumber Air Bersih	92
Gambar 5.3. Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Sampah.....	94
Gambar 5.4. Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Limbah Cair.....	96
Gambar 5.5. Kondisi Eksisting Sanitasi MCK di Lokasi Penelitian	98
Gambar 5.6. Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Sampah.....	99
Gambar 5.7. Prosentase Moda ke Tempat Kerja.....	103

Gambar 5.8. Prosentase Waktu Yang di perlukan untuk menuju ke tempat kerja. 105

Gambar 5.9. Distribusi Tempat Pembuangan Sampah..... 115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makin meningkatnya jumlah penduduk, baik karena Pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia menunjukkan kecenderungan terus dan berkembang pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun tingkat urbanisasi yang tinggi.

Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta menyediakan lapangan kerja, menjadi faktor yang menyebabkan urbanisasi penduduk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan. Sebagai akibatnya terjadi pertambahan penduduk, maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman di perkotaan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang tersebar di berbagai wilayah kota, baik yang direncanakan dengan baik maupun yang tidak/kurang terencana dengan baik.

Salah satu permasalahan umum yang terjadi di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dikemukakan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) tahun 1999, ialah bahwa kondisi penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman relative masih rendah, dimana hal ini dipengaruhi oleh tidak seimbangnya kemampuan

penyediaan prasarana dan sarana dengan laju pertumbuhan penduduk.

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan, baik itu ditangani oleh pemerintah, swasta maupun secara pribadi. Kawasan perumahan dan permukiman yang direncanakan oleh pemerintah (Perum Perumnas), swasta (REI), maupun secara pribadi oleh masyarakat golongan ekonomi menengah keatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar pada umumnya telah difasilitasi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.

Sementara kawasan perumahan dan permukiman yang tidak terencana umumnya ditangani secara pribadi, tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan sangat rendah dan tidak difasilitasi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sehingga mengakibatkan permukiman menjadi kumuh. Pada umumnya dihuni oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin dan menempati lahan-lahan permukiman baik yang legal maupun yang ilegal. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh seperti ini selain merusak keindahan kota juga' menjadi pusat pengangguran, sumber penyakit dan tindak kejahatan (Daldjoeni,1996:118).

Salah satu faktor penyebab berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh adalah ketersediaan fasilitas lingkungan permukiman yang kurang dan berakibat kepada suasana kehidupan yang kurang sehat. Menurut Sugandhi (2002:1) kondisi perumahan

dan permukiman di Indonesia saat ini masih ditandai oleh (1) Belum mantapnya sistim penyelenggara termasuk sistim kelembagaan yang dipertukan (2) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau; dan (3) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman di mana secara fungsional kualitas pelayanan masih terbatas dan belum memenuhi standar yang memadai.

Menurut Kadoatie dan Sugiyanto (2003:2), pengadaan prasarana dan sarana tidak dapat dilakukan secara terpisah dari perencanaan permukiman secara menyeluruh. Untuk itu perlu usaha-usaha untuk mengendalikan perkembangan permukiman kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan melalui pengembangan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, sesuai standar minimal, agar terwujud kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman dan teratur, harmonis dan berkelanjutan.

Masalah lingkungan permukiman kumuh hampir dapat dijumpai disetiap kota terutama kota-kota besar di Indonesia. Lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di perkotaan, akan menjadi agenda tersendiri perencanaan kota.

Kota Temate yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, tidaklah lepas dari permasalahan permukiman kumuh. Hampir semua kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Temate memiliki kawasan permukiman kumuh yang lokasinya ada pada daerah pesisir pantai/sungai dan pusat kota.

Beberapa wilayah kecamatan dengan kondisi permukiman yang tidak memenuhi persyaratan akibat bangunan hunian sangat buruk, jumlah kepadatan penduduk yang tinggi dan keadaan sosial ekonomi yang rendah, dan tidak difasilitasi dengan prasarana dan sarana yang memadai, salah satunya terdapat di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan pada kawasan ini tidak hanya melalui penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha ekonomi tetapi juga sekaligus kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan dan manfaat prasarana dan sarana permukiman Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate.?
2. Bagaimana ketersediaan dan manfaat prasarana dan sarana permukiman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketersediaan dan manfaat prasarana dan sarana permukiman Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dan manfaat prasarana dan sarana permukiman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan kawasan lingkungan permukiman.
2. Sebagai bahan acuan untuk dijadikan referensi.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis prasarana dan sarana lingkungan dalam penelitian ini difokuskan pada ketersediaan dan manfaat penyediaan prasarana lingkungan permukiman pesisir meliputi: jalan, air bersih, air limbah, pembuangan sampah dan drainase.
2. Lokasi penelitian adalah permukiman di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** : Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, Sistematika penulisan.
- Bab II** : Bagian kedua merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori tentang evaluasi, lingkungan permukiman kumuh, peranan pemerintah dalam penataan permukiman, konsep lingkungan permukiman yang ideal, prasarana lingkungan permukiman, prasarana sosial ekonomi, serta kerangka pikir.
- Bab III** : Bagian ketiga merupakan metode penelitian yang membahas waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta defenisi operasional.
- Bab IV** : Bagian keempat adalah gambaran wilayah penelitian meliputi profil wilayah penelitian, karakteristik responden, ketersediaan prasarana lingkungan permukiman, serta manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Gambesi.
- Bab V** : Bagian keempat adalah analisis dan pembahasan meliputi ketersediaan prasarana lingkungan permukiman, serta manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman

terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Gambesi.

Bab V : Bagian kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Permukiman Kumuh

Menurut Komarudin (1997:83) lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang/Ha), kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan yang hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun diatas tanah negara atau tanah milik orang lain dan diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan bahwa lingkungan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah Kota/Kabupaten tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan permukiman tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.

Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam surat edarannya yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan Walikota / Bupati seluruh Indonesia tahun 1993, bahwa yang dimaksud dengan perumahan dan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni, keadaannya tidak memenuhi teknis sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta persyaratan ekologis dan administrasi.

Sedangkan menurut Koestoer (2001:49), karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah sehingga terlihat jelek dan kotor.

Kawasan kumuh dapat dibedakan atas (Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001:7) adalah:

1. Kawasan kumuh di atas tanah legal (slums), adalah permukiman kumuh dengan segala ciri seperti tersebut di atas yang berlokasi di atas lahan yang peruntukannya memang perumahan.
2. Kawasan kumuh di atas tanah tidak legal (squatters), yaitu kawasan permukiman kumuh yang berada pada peruntukan yang bukan perumahan dalam RUTR, baik milik negara maupun milik perorangan atau Badan Hukum, yang dihuni secara tidak sah.

B. Peranan Pemerintah dalam Penataan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan

Umum kepada Pemerintah Daerah. Lingkup tugas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Daerah meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengembangan kegiatan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Dalam Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1987 tersebut disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah termasuk bidang Cipta Karya yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan, meliputi:

1. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
2. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah maka kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah:

1. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana detail tata ruang untuk suatu kawasan pengembangan kecuali kota atau kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan nasional dan atau provinsi.
2. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
3. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

4. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan gedung.

Penyelenggaraan urusan permukiman yang menjadi sebagian tugas otonomi tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang luas dengan titik berat operasional pada Pemerintah Daerah yaitu penyusunan program, kebutuhan dan program pembangunan permukiman, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian

pembangunan maupun hunian serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Di Kota Temate, kebijakan perbaikan permukiman telah dilaksanakan mulai dari berbagai program kegiatan perbaikan permukiman yang termuat dalam P3KT. Program pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 1979 yang meliputi:

1. Jalan Kendaraan
2. Jalan setapak
3. Sistem drainase (pembuangan air dari rumah)
4. Sarana sanitasi (MCK)
5. Sarana pembuangan sampah
6. Fasilitas pendidikan
7. Fasilitas Kesehatan (puskesmas)
8. Penyediaan Air bersih

Peranan pemerintah dalam penataan lingkungan sangat besar. Ini terbukti dengan pelaksanaan program perbaikan permukiman sejak tahun 1979 sampai sekarang. Hal ini merupakan upaya pemerintah

untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang ada dengan memperbaiki atau melengkapi prasarana dan sarana lingkungan perumahan. Berbagai Program yang perbaikan ditujukan pada lingkungan perumahan perkampungan di wilayah kota yang masih memungkinkan untuk diatur dan dikembangkan. Selain itu, karena tujuan program perbaikan permukiman menyangkut aspek sosial ekonomi, maka juga memaksa memperhatikan kualitas hidup masyarakat kota, yang mempunyai kaitan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat kota, khususnya dalam hal ini penghuni permukiman di kota.

C. Konsep Lingkungan Permukiman yang Ideal

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya cenderung untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal ini terlihat dalam kecenderungannya untuk membangun rumah secara berkelompok dalam suatu lingkungan yang dinamakan permukiman.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, menyatakan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar melalui penataan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur, pengembangan perumahan dan permukiman juga mempunyai tujuan lain, yaitu untuk memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi,

sosial, budaya dan bidang-bidang lain.

Proses pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman, mengintegrasikan secara terpadu, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang telah ada didalam atau disekitarnya. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan yang terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran dengan penatan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Dalam Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota oleh Departemen Pekerjaan Umum disebutkan bahwa lokasi perumahan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: tidak terganggu oleh polusi, tersedia air bersih, memberikan kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya, mempunyai aksesibilitas yang baik, mudah dan aman mencapai tempat kerja, tidak berada dibawah permukaan air setempat, dan mempunyai kemiringan rata-rata.

Menurut Sinulingga (1999:187) permukiman yang ideal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lokasinya tidak terganggu oleh kegiatan yang dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya. Misalnya jauh dari pembuangan sampah dan pabrik. Dan untuk mengurangi gangguan kebisingan terhadap lalu lintas maka kawasan permukiman yang terletak pada jalan arteri dan kolektor

akan diadakan pengaturan garis sempadan bangunan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

2. Mempunyai akses terhadap:

- a. Pusat-pusat pelayanan seperti pelayan pendidikan dan kesehatan, serta perdagangan.
- b. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air.
- c. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- d. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja, yang dapat dibuat dengan sistem individual, yaitu tangki septik dan lapangan rembesen ataupun tangki septik komunal.
- e. Dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- f. Dilengkapi fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, tempat ibadah, pendidikan sesuai skala besarnya permukiman
- g. Dilayani jaringan listrik dan telepon.

Komaruddin (1997) mengatakan rumah sehat harus memenuhi persyaratan penyehatan lingkungan, ketertiban, dan keserasian lingkungan. Komponen lingkungan perumahan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat hendaknya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan, antara lain penyediaan prasarana lingkungan yang

memadai dan sesuai dengan jumlah penghuni, serta pengamanan lingkungan perumahan terhadap pencemaran (pemeliharaan sumber air bersih, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga).

Budihardjo (1997), mengungkapkan bahwa permukiman memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pasif; sebagai penyediaan sarana dan prasarana fisik.
2. Fungsi Aktif; untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kehendak, aspirasi, adat dan tata cara hidup para penghuni dengan segenap dinamika perubahannya.

Lebih lanjut menurut Budihardjo, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian bagi tertib pembangunan, yaitu:

1. Alam; antara lain menyangkut tentang pola tata guna tanah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan, serta taman atau area rekreasi/olah raga.
2. Manusia; menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan fisik/fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan, tata nilai dan estetika.
3. Masyarakat; menyangkut tentang partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek sosial ekonomi, kependudukan.
4. Wadah/sarana kegiatan; menyangkut tentang perumahan, pelayanan umum (puskesmas, sekolah), fasilitas umum (toko, pasar).
5. Jaringan Prasarana; antara lain menyangkut utilitas (air, listrik, air

kotor), transportasi, komunikasi.

D. Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk menciptakan suatu lingkungan permukiman yang baik, maka diperlukan prasarana permukiman dan sarana umum permukiman. Adapun yang dimaksud dengan prasarana permukiman adalah jalan, air bersih, pembuangan air limbah, persampahan, drainase, listrik dan telepon (Sinulingga,1999:225). Menurut Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (1987:4) prasarana lingkungan adalah jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 1992, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik untuk berfungsinya suatu kawasan. Prasarana dasar untuk berfungsinya suatu lingkungan terdiri atas:

1. Jaringan lingkungan; merupakan jalan yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan, untuk kepentingan mobilitas orang dan barang, mencegah perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
2. Air bersih; merupakan air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga.
3. Saluran air kotor dan tempat pembuangan sampah; sebagai kelengkapan sanitasi untuk menjaga kesehatan lingkungan.
4. Drainase; merupakan sistem pengaliran air untuk mencegah suatu lingkungan terendam dalam waktu yang relatif lama.

Beberapa standar dan pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan berbagai prasarana lingkungan, meliputi: Kepmen PU No. 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman dan Pengembangan Wilayah tahun 2000 dan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-6981-2004) tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. Standar dan pedoman tersebut menjelaskan tentang prasarana lingkungan yang meliputi:

1. Jalan

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jenis jalan terdiri atas:

a. Jalan lokal sekunder I, adalah jalan yang ada dalam lingkungan perumahan, dan terdiri atas 2 jenis, yaitu:

- 1) Jalan setapak. Merupakan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan beroda dua dengan lebar jalan minimum 2 m, maksimum 3,5 m. Lebar perkerasan jalan minimum 1,5 m, lebar bahu jalan minimum 0,25 m, sedangkan sempadan bangunan minimum 1,75 m.



2) Jalan kendaraan. Merupakan jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang beroda tiga dan empat, dengan lebar badan jalan minimum 3,5 m dan maksimum 5 m. Lebar perkerasan jalan minimum 3 m, lebar bahu jalan minimum 0,25 m, sedangkan sempadan bangunan minimum 1,75 m.

b. Jalan lokal sekunder II; merupakan suatu jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m. Lebar perkerasan jalan minimum 4,5 m, lebar bahu jalan minimum 0,25 m, sedangkan sempadan bangunan minimum 2,5 m.

c. Jalan kolektor sekunder, adalah jalan yang menghubungkan antara lingkungan perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana minimum 20 km/jam, dengan lebar badan jalan minimum 7 m. Lebar perkerasan jalan minimum 6,5 m, lebar bahu jalan minimum 0,25 m, sedangkan sempadan bangunan minimum 3,5 m.

Dalam standar pelayanan minimal permukiman disebutkan standar pelayanan minimal panjang jalan lingkungan adalah 40-60m/ha, sedangkan untuk jalan setapak adalah 50 - 100m/ha.

Tabel 2.1 : Klasifikasi Jalan

No	Klasifikasi Jalan Lokal	Lebar badan Jalan minimum (m)	Lebar perkerasan Jalan minimum (m)	Lebar bahu jalan Minimum (m)	Sempadan bangunan minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat	
					Rumah bertingkat 2	Rumah bertingkat 1
1	Jalan lokal Sekunder - jalan setapak - jalan kendaraan	2.00	1.20	0.25	2.75	1.75
		3.50	3.00	0.50	2.75	1.75
2	Jalan lokal Sekunder I	5.00	4.50	0.50	3.50	2.50
3	Jalan kolektor sekunder	7.00	5.00	0.50	4.50	3.50

Sumber: SNI 03-6981-2004

2. Air Bersih

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga, sehingga setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan prasarana air bersih yang memenuhi syarat.

Parameter penilaian dan persyaratan kualitas air bersih dan air minum menurut Permen Kesehatan No.907/MENKES/PER/IX/2002 adalah: a). Syarat Fisika; air yang dikonsumsi harus memenuhi syarat jernih (tidak berwarna), tidak berbau, dan tidak berasa. b). Syarat Kimia; air harus bebas dari logam-logam atau zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Zat kimia yang dimaksud terdiri dari Kimia Organik misalnya detergen, DDT) dan Kimia Anorganik (misalnya Hg, Al, Na, Ph). c). Syarat Biologi; air yang dikonsumsi harus terbebas dari bakteri atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit pada perut/usus dan kuman-kuman lain yang tahan

asam perut.

Air minum dapat diperoleh antara lain dari PDAM, mata air, sumur artesis, sumur dangkal, air permukaan. Dari sumber-sumber tersebut ada yang masih memerlukan pengolahan dan ada yang tidak perlu pengolahan sebelum memenuhi syarat sebagai air minum.

Sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari PDAM untuk suatu lingkungan permukiman dapat dilakukan melalui sambungan rumah dan kran/hidran umum. Penyediaan air bersih pada prinsipnya diutamakan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih terutama pada daerah-daerah rawan air, permukiman kumuh, permukiman nelayan dan daerah tertinggal. Untuk lingkungan masyarakat yang berpenghasilan rendah biasanya menggunakan sistem penyediaan secara komunal (kran/hidran umum) yang pengelolaannya biasanya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak bersusun (1986:7) disebutkan, apabila tidak tersedia sistem air bersih kota maka harus diusahakan menyediakan dari sumber lain yang memenuhi persyaratan air bersih dan penyediaan air bersih lingkungan harus dapat melayani kebutuhan perumahan dengan persyaratan sebagai berikut a. Sambungan rumah/halaman dengan kapasitas minimum 60 liter/orang/hari. b. Sambungan kran umum dengan kapasitas

minimum 30 liter/orang/hari, dengan jumlah pemakai 200 orang/kran dan dengan radius pelayanan maksimum 100 m.

3. Air Limbah

Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (1997:6) disebutkan:

- a. Tangki septik Adalah sebuah bak yang terbuat dari bahan yang rapat air berfungsi sebagai bak pengendap yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk mendapatkan suatu pengolahan secara biologis oleh bakteri dalam waktu tertentu.
- b. Badan penerima adalah suatu fasilitas yang tersedia untuk menerima, mengalirkan atau menampung air buangan.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan PLPN-KIP Nelayan (2001:25) disebutkan:

- a. Sumber air limbah rumah tangga dapat dibedakan atas air limbah yang berasal dari limbah cucian, air kamar mandi, dapur, dan air limbah yang berasal dari WC.
- b. Air limbah yang berasal dari bekas cucian, air kamar mandi dan dapur dapat dialirkan ke saluran air limbah lingkungan atau saluran penampung air limbah (SPAL).
- c. Setiap rumah sedapat mungkin disediakan WC, apabila tidak dimungkinkan, dapat disediakan WC/KM komunal (MCK) yang penempatannya mudah dicapai dan dekat dengan pengguna.

- d. Air limbah yang berasal dari WC, dan tidak mempunyai tangki septik dapat dialirkan ke saluran air limbah yang memenuhi standar Spesifikasi Plumbing Indonesia,
- e. Untuk kawasan yang memungkinkan dibangun tangki septik dapat dibangun pada tiap-tiap unit rumah atau sistem tangki septik bersama (komunal).
- f. Pada daerah yang tidak bisa ditangani dengan tangki septik (rawa dan di atas air) dapat ditangani secara khusus.
- g. Jarak minimum tangki septik terhadap sumur pompa minimal 10 meter.
- h. Ukuran kapasitas tangki ditentukan berdasarkan jumlah orang yang dilayani, frekuensi pengambilan lumpur dan waktu pengendapan.
- 1) Ukuran besaran tangki septik dengan persyaratan
 - 2) Luas halaman cukup untuk bidang resapan
 - 3) Volume tangki septik minimal 1,5 m³
 - 4) Tinggi air dalam tangki minimal 1 m
 - 5) Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat air
 - 6) Tutup tangki septik harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa berdiameter 45 cm
 - 7) Ukuran lubang pemeriksa adalah 45 x 45 cm, pipa masuk terletak pada ketinggian minimum 2,5 cm lebih tinggi dari pipa keluar
- i. Sumur resapan dibuat sesuai dengan daya resap tanah.

Persyaratan MCK menurut Petunjuk Pelaksanaan PLPK-KIP (2001:14) dan Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Pedesaan (2001:L2-7) adalah:

- a. MCK harus dilengkapi dengan penyediaan air bersih, pembuatan septik tank dan sumur resapan.
 - b. 3 s/d 4 unit MCK Umum setiap kampung.
 - c. Satu jamban/unit dan satu kamar mandi/unit dapat melayani 12 KK atau 60 orang.
 - d. MCK harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya pada daerah basah, kering dan sulit air.
4. Prasarana Persampahan

Peningkatan mutu lingkungan bisa juga diawali dengan lingkungan perumahan yang bersih. Pada awalnya sampah harus dikelola oleh masing-masing rumah tangga. Sistem pembuangan sampah lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah pada masing-masing unit rumah, dan tempat pembuangan sementara (TPS) yang berfungsi sebagai tempat pengumpul pembuangan sampah dari rumah tangga.

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun (1986:21) disebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Pengumpulan sampah
 - a. Fasilitas pengumpulan sampah RT

- 1) Kapasitas minimum 0,02 m³/org
- 2) Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air
- 3) Penempatan mudah dicapai petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas

b. Tempat pengumpulan sampah lingkungan

- 1) Jarak penempatan tiap +150 m
- 2) Kapasitas minimum 2 m³/200 rumah

2. Pengangkutan sampah

- a. Fasilitas pengangkutan dapat berupa gerobak dorong, becak, dan mobil pengangkut. Gerobak sampah 1 unit (2 m³/2 ha/120 rumah).
- b. Jangka waktu pengangkutan maksimum 2 hari sekali, diusahakan setiap hari.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (2001:14), disebutkan penampungan bak sampah 6 m³/2 ha, jarak dari tempat tinggal terdekat 50-100 m, diangkat 2 kali/minggu.

5. Drainase

Drainase berfungsi untuk menyalurkan air hujan, agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Seringkali saluran ini dapat pula dimanfaatkan untuk pembuangan air limbah rumah tangga. Dalam pembuatan saluran drainase beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Saluran drainase ini harus disesuaikan dengan sistem drainase

yang lebih besar misalnya saluran sekunder.

- b. Ukuran saluran drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah.
- c. Saluran ini dibangun pada kiri kanan jaringan jalan.

Menurut Sinulingga (1999:226-227), saluran lokal yaitu saluran yang melayani permukiman pada tiap persil demi persil yang dapat berbentuk saluran terbuka atau tertutup. Untuk merencanakan dimensi masing-masing sistem diperlukan debit rencana banjir yang akan terjadi, yang besarnya tergantung kepada curah hujan yang terjadi, karakteristik daerah aliran dan koefisien aliran permukaan.

Untuk saluran lokal persyaratan spesifikasi teknis saluran terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut (Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, 2001:L2-4 dan Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun, 1986:21) adalah:

1. Persyaratan saluran terbuka:
 - a. Lebar saluran 0,3-1 m
 - b. Saluran berbentuk $\frac{1}{2}$ lingkaran, diameter minimum 20 cm
 - c. Kemiringan saluran 3% atau minimum 2% atau yang dapat mengalirkan air dengan kecepatan 0,3-0,6 m/detik
 - d. Kedalaman saluran minimum 40 cm
 - e. Dasar saluran beton/batu kali/buis beton

2. Persyaratan saluran tertutup:

- a. Saluran dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak 10m dan pada setiap belokan
- b. Kemiringan saluran minimum 2%
- c. Kedalaman saluran minimum 30 cm
- d. Bahan bangunan PVC, beton

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana (1991:8) disebutkan juga ukuran saluran pembuangan sekurang-kurangnya:

- a. Lebar atas 30 cm
- b. Lebar bawah 20 cm
- c. Tinggi 30 cm

Dalam buku SPM disebutkan standar pelayanan minimal panjang saluran air hujan adalah 120-250 m/ha.

Saluran drainase dari lingkungan perumahan dialirkan ke saluran penampung yang lebih besar kapasitasnya dan selanjutnya dialirkan ke sungai, danau, koam, atau laut. Jika melihat hal tersebut maka akan terkait dengan sistem drainase yang lebih kompleks yaitu sistem drainase kota

E. Prasarana Sosial Ekonomi

Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan permukimannya maka terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi

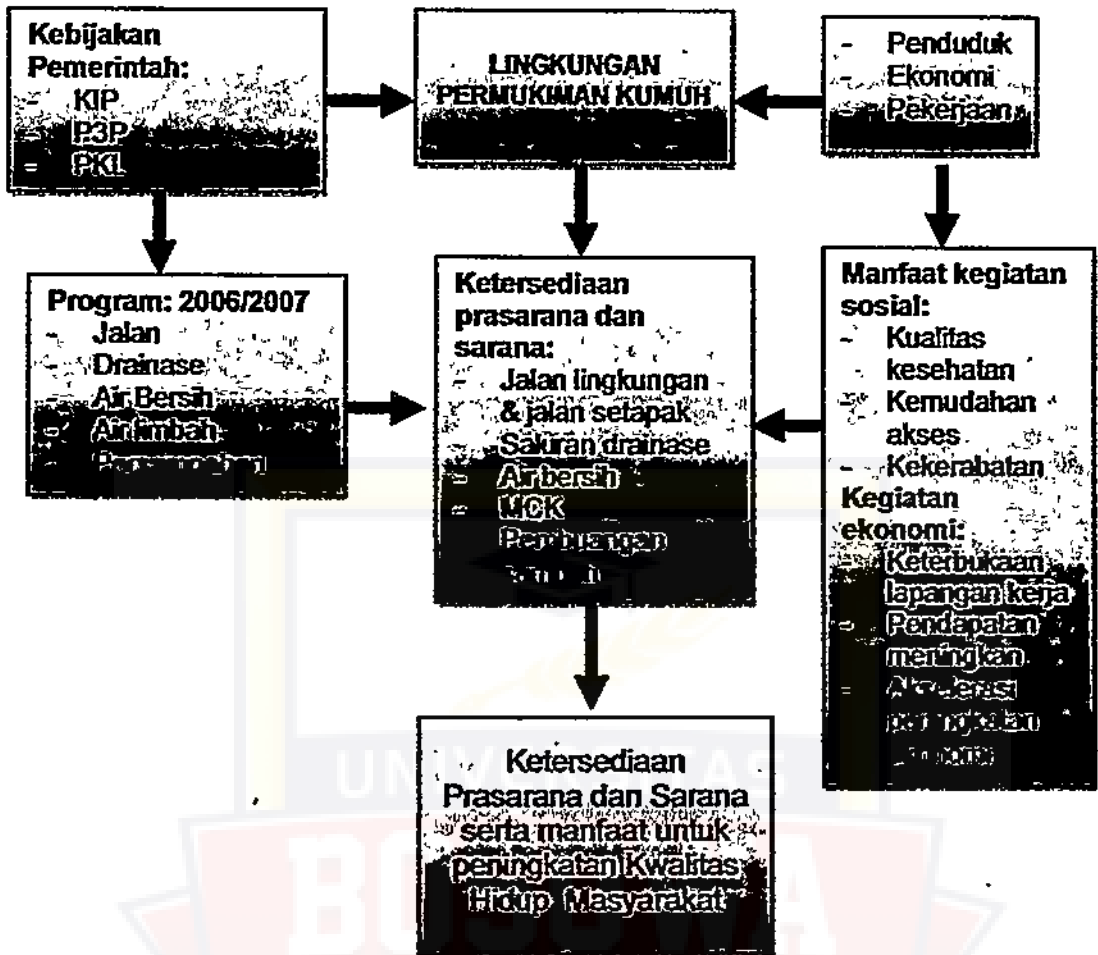
oleh kualitas perumahan dan permukiman dimana masyarakat tinggal, dan pembangunan perumahan dan permukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif (Kirmanto, 2002:3).

Hal ini berarti prasarana dan sarana lingkungan sebagai pendukung atau pelengkap perumahan dan lingkungan permukiman dapat berpengaruh terhadap keadaan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut Jayadinata (1999:34), prasarana yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi dapat dibedakan menurut fungsinya dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Prasarana sosial terdapat dalam kegiatan: keluarga, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, keamanan dan pertahanan, perhubungan dan komunikasi, informasi dan data.
2. Prasarana ekonomi terdapat dalam kegiatan: pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan/kehutanan, industri, konstruksi bangunan, pariwisata dan perhotelan, perdagangan dan jasa

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah serta teori-teori yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan tujuan penelitian, maka berikut ini disajikan kerangka pikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi serta melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Adapun cara penyajian datanya dengan tabel maupun distribusi frekuensi; grafik garis maupun batang; diagram lingkaran; penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku (Sugiyono: 2007, 29). Sedangkan desain penelitian ini menggunakan metode survey ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

1. Data Primer:

Data primer akan diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan beberapa masyarakat, pengumpulan kuisisioner yang disebarakan kepada para responden sebagai unit analisis dalam penentuan tingkat ketersediaan prasarana dan sarana permukiman, serta melakukan pengamatan langsung

dilapangan dengan mengamati bukti-bukti secara visual yang akan memperkuat hasil kesimpulan yang telah dibuat.

Data-data Primer yang dimaksud adalah:

- a. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana jalan yang mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat nelayan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Tingkat ketersediaan prasarana air bersih yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- c. Tingkat ketersediaan prasarana drainase dan pembuangan air limbah yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: penyediaan drainase, dan sanitasi permukiman.
- d. Tingkat ketersediaan prasarana pembuangan sampah yang mendukung program perbaikan lingkungan permukiman masyarakat.

2. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan dokumen atau arsip, literatur, gambaran umum wilayah yang diperoleh dari instansi terkait yaitu; Badan Statistik Kota Temate, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Bappeda serta data pada Kecamatan Temate Selatan dan Kelurahan Gambesi sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.



Data Sekunder seperti:

- a. Gambaran umum daerah penelitian, yang menggambarkan kondisi wilayah penelitian berupa lokasi administrasi, geografis, dan demografi.
- b. Sosial dan ekonomi masyarakat berupa mata pencaharian utama dan tambahan, tingkat pendapatan, serta tingkat pendidikan .
- c. kepemilikan lahan dapat diketahui berdasarkan data penggunaan lahan.
- d. Tingkat vitalitas ekonomi
- e. Ketersediaan prasarana dan sarana
- f. Ketersediaan infrastruktur
- g. Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kecamatan Wilayah Penelitian
- h. Informasi mengenai arah perkembangan kota/wilayah

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada lingkungan Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lingkungan Kelurahan Gambesi merupakan salah satu kawasan permukiman yang lokasinya ada pada daerah pesisir pantai serta kurangnya prasarana dan sarana yang memadai.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September sampai bulan Oktober 2014. Waktu pelaksanaan

penelitian digunakan untuk melakukan survei, wawancara, pengumpulan data, analisis data sampai dengan penyajian hasil penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk atau Kepala Keluarga yang tinggal dan menetap di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan dengan jumlah Kepala Keluarga di kawasan permukiman tersebut sebesar 804 KK.

Tabel 3.1. Rukun Tangga, dan Penduduk Menurut RW di Kelurahan Gambesi Tahun 2013

No	Rukun Warga (RW)	Rukun Tangga (RT)	Penduduk (Jiwa)
1	RW I	6	706
2	RW II	6	691
3	RW III	5	679
4	RW IV	5	65
JUMLAH			2.731

Sumber: Profil Kelurahan Gambesi Tahun 2014

2. Sampel Responden

Setelah melakukan penarikan populasi maka langkah selanjutnya adalah penarikan sampel responden yang dilakukan dengan berdasarkan pada jumlah populasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti, maka kami merujuk pada pendapat Arikunto (1998:127) yang menyatakan bahwa dalam penelitian deskriptif sampel minimum adalah 10% hingga 15% dari populasi, jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak $804 \times 15\% = 120,6$ dan di bulatkan menjadi 120 Kepala Keluarga.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) dengan pertimbangan populasi dianggap

homogen ditinjau dari latar belakang sosial ekonomi dan dari segi fisik bangunannya yaitu dengan memberi nomor urut nama semua kepala keluarga mulai dari 1 sampai dengan banyaknya subjek. Kemudian nomor subjek tersebut masing-masing dituliskan pada potongan kertas kecil lalu diundi dan diambil sebanyak sampel yang dibutuhkan, sehingga dapat memberi hak yang sama kepada setiap subjek (Kepala Keluarga) untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel, sehingga di dapatkan sampel responden pada lingkungan kelurahan tersebut.

Untuk memperkuat data yang diperoleh dari responden juga dilakukan wawancara terhadap instansi terkait seperti, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), aparat Kecamatan Temate Selatan dan Aparat Kelurahan tempat dilaksanakan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yang meliputi identifikasi ketersediaan prasarana lingkungan yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Kuesioner yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang diisi oleh responden, dengan jawaban yang telah disediakan berupa pilihan (*multiple_choice*).

3. Wawancara yaitu wawancara secara mendalam dan langsung dengan masyarakat di lokasi penelitian, tokoh-tokoh masyarakat, pihak kelurahan dan instansi terkait.
4. Dokumentasi yaitu merekam kondisi eksisting dilapangan secara visual dalam bentuk gambar dan foto-foto.
5. Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait dan studi literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Terhadap rumusan masalah pertama adalah melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekwensi dan analisis persentase serta membandingkan terhadap standar dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Menurut Suharsimi (1997:246), teknik deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan data kuantitatif, yang disajikan secara persentase kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Atau sebaliknya, data kualitatif yang ada seringkali dikuantifikasikan, diangkakan sekedar untuk mempermudah, kemudian sesudah terdapat hasil akhir lalu dikualifikasikan kembali.

Berkaitan dengan penelitian ini, analisis dilakukan untuk memperoleh

gambaran komprehensif tentang tingkat ketersediaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Gambesi kemudian membandingkan terhadap standard NSPM dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Demikian pula untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan prasarana dasar tersebut.

Untuk mengetahui ketersediaan prasarana dasar berdasarkan pada tingkat dan persepsi masyarakat, maka digunakan analisis statistik deskriptif (Suharsimi : 1997) dengan rumus sebagai berikut :

1. Nilai : Bobot x Frekwensi
2. Rata-rata skor : $\frac{\sum \text{Nilai}}{n}$
3. Rata-rata persen : $\frac{\text{Rata-rata Skor}}{\text{Banyaknya Klasifikasi Jawaban}} \times 100$

Sedangkan untuk mengukur indikator digunakan skala berjenjang dari jawaban yang positif (+) sampai dengan yang negatif (-). Gradasi jawaban yang positif dengan pilihan sangat baik (Persentase/skor: 90 – 100%) secara berurutan sampai jawaban yang negatif dengan pilihan tidak baik (persentase/skor: 0 – 40%).

Tabel 3.2 Indikator dan Cara Pengukuran Variabel Penelitian

KLASIFIKASI PERNYATAAN		
NO	KLASIFIKASI/INDIKATOR	BOBOT PROSENTASE
1	Sangat Baik (SB)	90 – 100%
2	Baik (B)	80 – 90%
3	Cukup Baik (CB)	60 – 80%
4	Kurang Baik (KB)	40 – 60%
5	Tidak Baik (TB)	0 – 40%

2. Terhadap rumusan masalah kedua manfaat ketersediaan prasarana terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat adalah analisis deskriptif kualitatif menggunakan tabulasi berdasarkan jawaban dari responden dan metode yang dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, menguraikan, serta menganalisis variabel-variabel yang dinyatakan dengan sebaran frekwensi, berupa angka mutlak dan prosentase, sehingga dapat di ketahui manfaat ketersediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui frekwensi tersebut digunakan rumus:

$$P = f/n \times 100\%$$

dimana P = Prosentase

f = Frekwensi

n = Jml frekwensi dari seluruh kategori/responden

Nilai tabel frekwensi digunakan untuk mengkategorikan data dalam tabel silang (*Crosstab*). Selanjutnya dari hasil tabel tersebut dijelaskan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas; terhadap variabel, indikator dan cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan defenisi operasional yang diuraikan secara terperinci.

Adapun variabel dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) komponen utama yang meliputi:

- a. Ketersediaan prasarana lingkungan permukiman
- b. Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan terhadap kegiatan sosial ekonomi

1. Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman

Prasarana lingkungan permukiman dalam penelitian ini meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, MCK dan saluran pembuangan air limbah, saluran drainase, serta sarana persampahan.

- a. Jalan (jalan kendaraan dan setapak). Ditinjau dari variabel ketersediaan jalan lingkungan, maka indikator dan tolok ukur yang digunakan adalah:

1) Lebar Jalan

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar mencapai 80-90%
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar mencapai 40-60%
- e) Ketersediaan tidak baik jika kesesuaian dengan standar antara 0-40%

2) Panjang Jalan

- a) Ketersediaan sangat tinggi jika kesesuaian dengan standar

antara 90-100%

- b) Ketersediaan tinggi jika kesesuaian dengan standar mencapai 80-90%
- c) Ketersediaan cukup tinggi jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d) Ketersediaan rendah jika kesesuaian dengan standar mencapai 40-60%
- e) Ketersediaan sangat rendah jika kesesuaian dengan standar antara 0-40%

3) Material Perkerasan jalan kendaraan

- a) Ketersediaan sangat baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 90-100%
- b) Ketersediaan baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal mencapai 80-90%
- c) Ketersediaan cukup baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 60-80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal mencapai 40-60%
- e) Ketersediaan tidak baik jika jalan yang diperkeras dengan aspal antara 0-40%

4) Material jalan lingkungan dan setapak

- a) Ketersediaan sangat baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 90-100%
- b) Ketersediaan baik jika jalan yang diperkeras dengan

rabat/paving blok mencapai 80-90%

c) Ketersediaan cukup baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 60-80%

d) Ketersediaan kurang baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok mencapai 40-60%

e) Ketersediaan tidak baik jika jalan yang diperkeras dengan rabat/paving blok antara 0-40%

b. Air bersih, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah:

1) Kepemilikan sambungan rumah

a) Ketersediaan sangat baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 90-100% dari jumlah responden

b) Ketersediaan baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 80-90% dari jumlah responden

c) Ketersediaan cukup baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 60-80% dari jumlah responden

d) Ketersediaan kurang baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 40-60% dari jumlah responden

e) Ketersediaan tidak baik jika memiliki sambungan rumah mencapai 0-40% dari jumlah responden

2) Kualitas Air bersih (rasa, bau, warna)

a) Ketersediaan sangat baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 90-100% dari jumlah responden

- b) Ketersediaan baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 80-90% dari jumlah responden
 - c) Ketersediaan cukup baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 60-80% dari jumlah responden
 - d) Ketersediaan kurang baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 40-60% dari jumlah responden
 - e) Ketersediaan tidak baik jika penggunaan air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa mencapai 0-40% dari jumlah responden
- 3) Kontinuitas pengaliran air bersih
- a) Ketersediaan sangat baik jika lama aliran air bersih antara 90-100% dari 24 jam
 - b) Ketersediaan baik jika lama aliran air bersih antara 80-90% dari 24 jam
 - c) Ketersediaan cukup baik jika lama aliran air bersih antara 60-80% dari 24 jam
 - d) Ketersediaan kurang baik jika lama aliran air bersih antara 40-60% dari 24 jam
 - e) Ketersediaan tidak baik jika lama aliran air bersih antara 0-40% dari 24 jam

c. Air Limbah, dengan indikator dan tolok ukur yang digunakan adalah;

1) Kepemilikan MCK individu

- a) Ketersediaan sangat baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 90-100% dari jumlah responden
- b) Ketersediaan baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 80-90% dari jumlah responden
- c) Ketersediaan cukup baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 60-80% dari jumlah responden
- d) Ketersediaan kurang baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 40-60% dari jumlah responden
- e) Ketersediaan Tidak baik jika jumlah rumah yang memiliki MCK mencapai 0-40% dari jumlah responden

2) Jumlah MCK umum

- a. Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b. Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80-90%
- c. Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d. Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40-60%
- e. Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0-40%

d. Sampah, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah:

1) Jumlah TPS

- a. Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b. Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80-90%
- c. Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 6-80%
- d. Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40-60%
- e. Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0-40%

2) Jumlah Gerobak sampah

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80-90%
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40-60%
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0-40%

e. Drainase, dengan indikator dan tolak ukur yang digunakan adalah:

1) Panjang Drainase

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80-90%
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40-60%
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0-40%

2) Lebar dan dalam /tinggi drainase

- a) Ketersediaan sangat baik jika kesesuaian dengan standar antara 90-100% atau lebih
- b) Ketersediaan baik jika kesesuaian dengan standar antara 80-90%
- c) Ketersediaan cukup baik jika kesesuaian dengan standar antara 60-80%
- d) Ketersediaan kurang baik jika kesesuaian dengan standar antara 40-60%
- e) Ketersediaan tidak baik kesesuaian dengan standar antara 0-40%

2. Manfaat Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi

a. Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap kegiatan sosial. Adalah prasarana lingkungan yang dapat mendukung kegiatan sosial masyarakat pemhuninya.

Variabel dan indikator pengukurannya adalah:

- 1) Jalan dengan sub variabel dan indikator, Kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sosial dinilai dari:
 - a) Moda transportasi yang dapat melewati, dinilai dari: pejalan kaki, sepeda, becak, motor, dan mobil
 - b) Melayani akses ke tempat kegiatan/aktifitas masyarakat
 - c) Interaksi masyarakat di dalam atau keluar permukiman
- 2) Air bersih, dengan sub variabel dan indikator: Cara peroleh air bersih:
 - a) Sumber air bersih, dinilai dari: sambungan rumah, sumur pompa, sumur, beli
 - b) Jarak sumber air bersih
- 3) Air limbah, dengan sub variabel dan indikator: Cara membuang limbah secara sehat:
 - a) Tempat membuang limbah, dinilai dari : MCK umum/individu
 - b) Kondisi MCK dinilai dari: rusak, layak pakai, baik
 - c) Jarak MCK dinilai dari: dekat, agak jauh, sangat jauh
 - d) Sumber air bersih pada MCK dinilai dari: sambungan kran, sumur, tidak ada

4) Sampah dengan sub variabel dan indikator: Cara pembuangan dan pengangkutan sampah dinilai dari:

- a) Tempat membuang sampah: laut, TPS, wadah individu, lahan kosong, dibakar/ditanam
- b) Cara pengangkutan sampah, dinilai dengan: dibawa sendiri, gerobak petugas
- c) Frekuensi pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir

5) Drainase dengan sub variabel dan indikator:

- a) Kelancaran pembuangan air hujan, dinilai dengan: banjir/ sangat tergenang, agak tergenang, tidak tergenang
- b) Kemudahan kegiatan sosial dengan ada tidaknya genangan

b. Manfaat ketersediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap kegiatan ekonomi. Adalah prasarana lingkungan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat penghuninya. Variabel dan indikator pengukurannya adalah:

1) Jalan, dengan indikator:

Kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan ekonomi, dinilai dengan kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan dari dan ke tempat beraktifitas.

2) Air bersih, dengan indikator:

Kecukupan supply air bersih untuk kebutuhan dan kegiatan penduduk.

3) Air limbah, dengan indikator:

Pengolahan limbah rumah tangga dengan tidak mencemari lingkungan permukiman

4) Sampah, dengan indikator:

Persampahan dinilai dengan tempat pembuangan sampah dan jarak tempat sampah

5) Drianase, dengan indikator:

Kelancaran kegiatan ekonomi dengan ada tidaknya genangan.



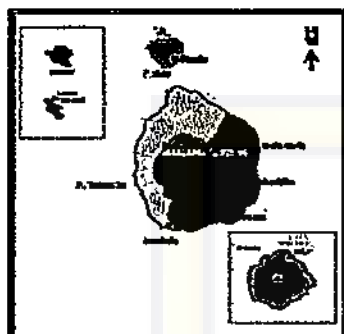
BAB IV

GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE

1. Profil Wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

a. Kondisi Geografis



Kota Ternate sebagai salah satu kota yang terletak di Kawasan timur Indonesia yang terkenal memiliki kekayaan alam berlimpah termasuk rempah-rempah. Kondisi kekayaan alam

yang dimiliki Kota Ternate tersebut merupakan salah satu daya tarik bangsa asing seperti Portugis dan Belanda untuk melakukan penjajahan di Maluku Utara khususnya Kota Ternate.

Letak Kota Ternate yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki fasilitas pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung bangsa Asing untuk menjajah wilayah ini. Kota Ternate merupakan wilayah Kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar $162,03 \text{ km}^2$, sementara lautannya $5.547,55 \text{ km}^2$. Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah Pulau, tiga diantaranya tidak berpenghuni, dan mempunyai batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Laut Maluku
 Sebelah Selatan : Laut Maluku
 Sebelah Timur : Selat Halmahera
 Sebelah Barat : Laut Maluku

Seperti umumnya wilayah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula dengan Kota Temate. Dari 77 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Temate, 56 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai sedangkan 21 Kelurahan lainnya berklasifikasi kelurahan bukan pantai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Temate 2013

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JARAK DARI IBUKOTA KAB/KOTA (KM)	LUAS KECAMATAN (KM ²)	PRESENTASE (%)
1.	Pulau Temate	Jambula	10,1	37,23	22,98
2.	Mofi	Mofi Kota	35,4	24,8	15,31
3.	Pulau Batang Dua	Mayau	121,6	29,04	17,92
4.	Hiri	Faudu	14,1	6,70	4,14
5.	Temate Selatan	Kalumata	4,9	16,98	10,48
6.	Temate Tengah	Salahuddin	1,7	10,85	6,70
7.	Temate Utara	Dufa-Dufa	5,3	14,38	8,87
8.	Hutan Lindung	-	-	22,05	13,61
		JUMLAH		162,03	100,00

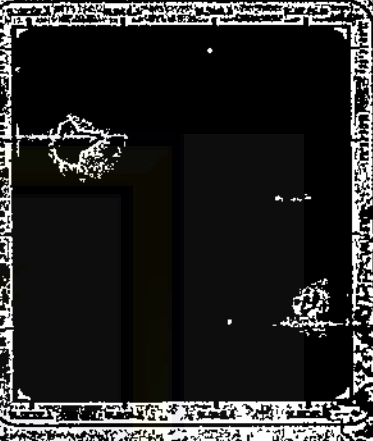
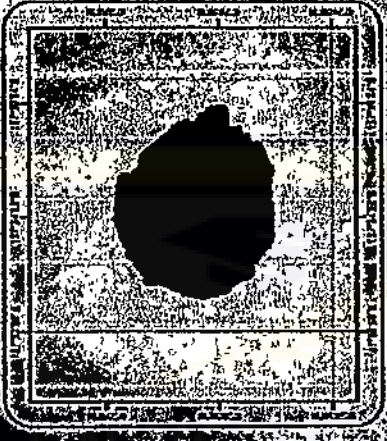
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Temate 2014

Berdasarkan tabel 4.1 maka diketahui bahwa kecamatan dengan luas terbesar di Kota Temate yakni Kecamatan Pulau Temate dengan luas 37,23 Km² atau 22,98 % dari total luas wilayah Kota Temate, sedangkan luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Hiri dengan luas 6,70 Km² atau persentase dari luas wilayah kabupaten hanya 4,14 %. Dengan demikian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut :

**PETA ADMINISTRASI
KOTA TERNATE**

Keterangan

- Batas Kecamatan
- ~ Garis Pantai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Sungai
- Hutan Lindung
- Kecamatan Ternate Utara
- Kecamatan Ternate Tengah
- Kecamatan Ternate Selatan
- Kecamatan Ternate
- Kecamatan Pulau Hiri
- Kecamatan Pulau Balang Dua
- Kecamatan Moli
- Bathimery (Kodalem Laut)



Dari segi topografi Kota Temate secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 1.025 meter dari permukaan laut.

b. Kondisi Demografi

Temate adalah ibukota sementara Provinsi Maluku Utara yang menyimpan sejuta khazanah. Dimulai dari letaknya yang sangat strategis, hingga kekayaan alamnya yang melimpah. Kota Temate memiliki pula kekayaan alam yang melimpah meskipun hingga kini sebagian besar dari potensi yang dimilikinya belum dikelola dengan baik.

Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Temate yang terdiri dari 7 Kecamatan, berdasarkan hasil Susenas 2014, penduduk Kota Temate tercatat sebesar 190.184 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Temate pada 7 Kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang berbeda. Kepadatan penduduk yang terbesar berada di wilayah Kecamatan Temate Selatan yaitu sebesar 34,33% dan kepadatan terkecil berada di wilayah Kecamatan Pulau Batang Dua yaitu sebesar 1,34%. Bila dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kota Temate, terdapat 96.755 laki-laki dan 93.429 perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kota Temate

jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Temate Menurut Jenis Kelamin Di Kota Temate Provinsi Maluku Utara 2013

No	Nama Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pulau Temate	7 629	7 418	15 048
2	Moti	2 203	2 302	4 505
3	Pulau Batang Dua	1 289	1 258	2 547
4	Hiri	1 424	1 377	2 801
5	Temate Selatan	33 230	32 054	65 283
6	Temate Tengah	27 380	25 948	53 328
7	Temate Utara	23 601	23 072	46 673
JUMLAH		96 755	93 429	190 184

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Temate 2014

c. Perkembangan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Temate pada tahun 2014 tercatat 1,32 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 1,14 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Temate juga mengalami peningkatan dari 652,36 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 705,17 miliar rupiah pada tahun 2014.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian Temate dengan kontribusi sebesar 29,84 persen, diikuti oleh sektor jasa (17,21 persen) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (17,05 persen).

Adapun potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah ini berasal dari beberapa sektor yaitu, : sektor Pertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, serta Sektor Pertambangan dan Energi. Selainnya itu, untuk menjangkau Kota Temate yang juga ibukota sementara Provinsi Maluku Utara yang merupakan Provinsi ke-27 di Indonesia dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara yang berpangkalan di Bandara Babullah Kecamatan dengan volume penerbangan setiap hari. Selain itu daerah Temate juga dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi laut seperti PELNI, Fery, dan kapal laut lainnya.

Faktor penunjang lain yang ada berupa sarana akomodasi seperti hotel berbintang lima dan penginapan meskipun baru sebatas kelas melati, restaurant dan rumah makan serta fasilitas telepon berupa Telkom dan Telepon Selular (ponsel) serta perbankan yang siap melayani kebutuhan calon investor yang berkunjung ke daerah ini. Khusus untuk Pariwisata, daerah ini juga

memiliki potensi yang tak kalah dengan daerah lainnya. Potensi wisata itu berupa wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

2. Profil Wilayah Kecamatan Temate Selatan Kota Temate

Wilayah Kecamatan Temate Selatan merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Temate dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan dan Luas wilayah 16,98 Km² atau 10,48%. Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi yang umumnya masih merupakan tanah kosong dan dataran rendah yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman penduduk dengan posisi kemiringan pada tingkat sedang.

Seperti halnya Kecamatan lain yang ada di Kota Temate pada umumnya iklim di Kecamatan Temate Selatan juga merupakan daerah tropis sehingga iklim di Kecamatan ini dipengaruhi oleh iklim wilayah yang mengenal dua musim yaitu musim Utara – Barat dan musim Timur – Selatan yang diselingi dua kali pancaroba. adapun batas wilayah Kecamatan Temate Selatan sebagai berikut:

- Bagian Utara** : Kecamatan Temate Tengah
- Bagian Selatan** : Kecamatan Pulau Temate
- Bagian Timur** : Laut Halmahera
- Bagian Barat** : Hutan Lindung

Kecamatan Temate Selatan dengan ibukota Kalumata merupakan salah satu dari 7 Kecamatan yang berada di Kota Temate dan memiliki 17 Kelurahan, dengan luas wilayah 16,98 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk, Luas, dan Jarak dari Ibukota Kecamatan di Kecamatan Temate Selatan 2013

No	KELURAHAN	STATUS (D/k)	JARAK DARI IBUKOTA KAB. (KM)	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK
1.	Sasa	Kelurahan	5,6	3,04	3.671
2.	Gambesi	Kelurahan	4,5	1,56	2.731
3.	Fitu	Kelurahan	3,7	1,68	2.892
4.	Kalumata	Kelurahan	0,8	1,17	8.456
5.	Kayu Merah	Kelurahan	0,7	1,79	5.096
6.	Bastiong Talangame	Kelurahan	1,8	0,91	5.103
7.	Ubo-Ubo	Kelurahan	1,8	0,65	3.041
8.	Mangga Dua	Kelurahan	2,5	0,76	3.683
9.	Jati	Kelurahan	1,8	0,38	4.647
10.	Toboko	Kelurahan	3,3	0,70	2.183
11.	Tanah Tinggi	Kelurahan	3,8	0,13	3.511
12.	Ngade	Kelurahan	2,1	0,20	1.277
13.	Bastiong Karance	Kelurahan	1,3	1,20	4.839
14.	Tabona	Kelurahan	1	0,60	3.241
15.	Jati Perumnas	Kelurahan	1,5	1,70	2.735
16.	Mangga Dua Utara	Kelurahan	2,4	0,30	4.571
17.	Tanah Tinggi Barat	Kelurahan	3,1	0,21	2.069
JUMLAH				16,98	65.283

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Temate 2014

3. Profil Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan

a. Geografis

Secara administratif Kelurahan Gambesi berada di Kecamatan Temate Selatan, Kota Temate Provinsi Maluku Utara. Dengan luas wilayah 1,56 Km dan kondisi Topografi yang merupakan wilayah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 67 meter di atas permukaan laut dan dengan tingkat kemiringan lahan 0 – 45 dan Keseluruhan lahan yang ada di Kelurahan Gambesi merupakan dataran subur, dengan jenis tanah Regosol dan tekstur tanah Vulkanis. Dilihat dari jarak antara ibu Kota Kecamatan ke Kelurahan adalah 4.5 Kilometer. Luas wilayah Kelurahan Gambesi 1,56 Km², prosentase luas daerah Kelurahan terhadap Luas Kecamatan yaitu 8.03%. Pembagian daerah administrasi di Kelurahan Gambesi yaitu terdiri dari 4 (empat) lingkungan/Rukun Warga dan 22 RT, sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Jumlah RW dan RT di Kelurahan Gambesi

No	Rukun Warga (RW)	Rukun Tangga (RT)	Penduduk (Jiwa)
1	RW I	6	706
2	RW II	6	691
3	RW III	5	679
4	RW IV	5	655
JUMLAH			2.731

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Temate 2014

b. Keadaan Iklim

Keadaan Iklim Kota Ternate dan sekitarnya termasuk Kelurahan Gambesi sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahunnya.

Iklim Kota Ternate dan sekitarnya termasuk Kelurahan Gambesi adalah tropis, Nilai rata-rata kelembaban tertinggi terjadi pada bulan-bulan yang curah hujannya tinggi, meskipun variasi tiap bulannya tidak tinggi. Kelembaban tertinggi pada Januari dan April yaitu sebesar 86 % dan terendah pada bulan Agustus yaitu 78 %.

Dengan demikian untuk penerapan permukiman pada pesisir pantai tersebut perlu memperhatikan tentang pengaruh iklim tersebut diatas, misalnya untuk bangunan (fisik) yang perlu diperhatikan adalah menghitung jumlah bukaan, perhitungan sudut atap (pengaruh dari sinar matahari dan curah hujan) serta pemilihan jenis bahan yang sesuai dengan keadaan iklim setempat.

c. Topografi

Dari segi topografi Kota Ternate secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada kemiringan rendah terletak linear memanjang mengikuti beberapa pesisir pantai pada posisi 0-2 derajat seluas 54,96 km² atau 22 %.

d. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Gambesi sebanyak 2.731 jiwa dengan 1.479 jiwa laki-laki dan 1.252 jiwa

perempuan serta jumlah Kepala Keluarga sebesar 804 KK (BPS Kecamatan Temate Selatan Tahun 2014). Kepadatan penduduk per Km² adalah sebesar 1.751 jiwa. Persentase penduduk Kelurahan Gambesi adalah 5,00% dari jumlah penduduk Kecamatan Kecamatan Temate Selatan.

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan RW dan RT di Kelurahan Gambesi

No	Rukun Warga (RW)	Rukun Tangga (RT)	Penduduk (Jiwa)
1	RW I	6	706
2	RW II	6	691
3	RW III	5	679
4	RW IV	5	655
JUMLAH			2.731

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

Adapun mata pencaharian penduduk Kelurahan Gambesi antara lain:

- a) Pegawai Pemerintah
- b) Pegawai Swasta
- c) Nelayan
- d) Guru
- e) Pedagang
- f) Petani
- g) Lainnya seperti buruh,

Dari statistik penduduk dan mata pencaharian Kelurahan Gambesi, prosentase terbesar mata pencaharian penduduk adalah pegawai negeri sebesar 15% atau 522 jiwa, kemudian pegawai swasta 10% atau 512 jiwa serta pedagang 234 jiwa atau 4%. Besarnya tingkat mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan dan petani di sebabkan oleh kondisi geografis yang berbatasan



dengan pantai/pesisir dan jenis tanah di Kota Temate sehingga tipologi masyarakatnya lebih cenderung kedua mata pencaharian tersebut.

e. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kelurahan Gambesi adalah pertanian dan perikanan, salah satu jenis tanaman pertanian yaitu jagung dan sayur-mayur yang di kembangkan oleh masyarakat serta hasil-hasil perikanan.

f. Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada terciptanya sistem kegiatan pendidikan sebagai media sirkulasi aliran barang dan jasa sesuai fungsi pengelolaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi hasil-hasil produksi masyarakat serta memperluas jaringan pemasaran.

Untuk menentukan arahan pengembangan Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan tidak hanya dari aspek fisik saja, juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, hal ini di maksudkan untuk melihat potensi masyarakat dalam kegiatan sektor ekonomi yang dominan, pola dan sistem distribusi kegiatan sektor ekonomi serta kecenderungan perkembangan sektor ekonomi, sehingga dapat memudahkan dalam menentukan sektor-sektor kegiatan yang dapat di kembangkan.

Fasilitas sosial ekonomi berupa prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kelurahan Gambesi masih sangat minim bila di

bandingkan dengan jumlah penduduk Kelurahan Gambesi yang masih membutuhkan prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang. Adapun fasilitas dan prasarana di uraikan sebagai berikut :

1) Pola Permukiman

Perumahan di kawasan pesisir termasuk di dalamnya pada dasarnya berakar pada faktor-faktor geografi dan sejarah selama berabad-abad. Pada jaman dahulu, ketika transportasi air dimanfaatkan secara intensif dan penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga masih diperoleh dari sumber secara langsung, maka perumahan berkembang pesat di sekitar jalur-jalur perairan, seperti sungai, danau dan laut. Pada perkembangan selanjutnya, perumahan di atas air masih menjadi alternatif permukiman. Gejala tersebut diduga dapat terjadi karena (Balai PTPT Denpasar 2009):

- merupakan kawasan alternatif permukiman kota bagi kaum urbanis miskin.
- merupakan peluang bagi kemudahan transportasi.
- menjadi pintu gerbang alami untuk perdagangan antar tempat yang terpisahkan oleh badan air (laut, sungai dan danau), yang memanfaatkan transportasi air.

2) Kondisi Lingkungan Permukiman

Karakteristik kehidupan penduduk yang bermukim di kawasan pesisir Kelurahan Gambesi yang cukup menonjol

adalah sifat gotong royong mereka yang masih kental. Mengacu pada karakteristik masyarakat di Kelurahan Gambesi berupaya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi serta pelaksanaannya di dasarkan pada musyawarah desa yang telah di sepakati, maka program dapat dipastikan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat

Jumlah dan banyaknya rumah berdasarkan pada lingkungan di Kelurahan Gambesi di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6: Jumlah Rumah di Kelurahan Gambesi Menurut Lingkungan/RW

No	Lingkungan/Rukun Warga	Rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase (%)
1	RW I	212	118	26,82
2	RW II	202	115	26,14
3	RW III	197	106	24,09
4	RW IV	193	101	22,95
JUMLAH		804	440	100

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dan jumlah unit rumah terbanyak di Kelurahan Gambesi yaitu pada RW I dengan jumlah masing 118 unit (26,82%) sedangkan yang terkecil unit permukiman yaitu RW IV sebesar 101 unit rumah atau 22,95%. Banyaknya rumah di kelurahan gambesi tersebut di atas sehingga terjadi kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan prasarana yang tersedia.

3) Fasilitas Permukiman

Kelurahan Gambesi yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan umumnya

mempunyai prasarana dan sarana yang berkaitan dengan pola kehidupan masyarakatnya. Prasarana tersebut di butuhkan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan masyarakat pada kawasan tersebut.

4) Fasilitas Pendidikan

Pelayanan pendidikan sangat menentukan mutu dan tingkat pendidikan masyarakat, oleh sebab itu memerlukan ketersediaan pelayanan yang tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga memperhatikan ketersediaan prasarana pendidikan, tenaga pengajar serta kurikulum pendidikan yang di sajikan. Fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Gambesi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 : Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Gambesi

No	JENIS FASILITAS PENDIDIKAN	JUMLAH (unit)	PROSENTASE (%)
1	TAMAN KANAK-KANAK	1	14,28
2	SEKOLAH DASAR (SD)	2	28,57
3	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	2	28,57
4	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	1	14,29
5	PERGURUAN TINGGI	1	14,29
	JUMLAH	7	100

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

Berdasarkan pada tabel fasilitas pendidikan di Kelurahan Gambesi dapat di simpulkan bahwa untuk fasilitas pendidikan masih kurang, hal ini dapat di kaitkan dengan jumlah penduduk Kelurahan Gambesi yang mencapai 2.731 jiwa dengan jumlah usia sekolah sekitar 45,3% sehingga fasilitas pendidikan masih sangat di butuhkan untuk peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 4.3 Fasilitas Pendidikan Universitas Khairun Temate di Gambesi

5) Fasilitas Kesehatan

Upaya untuk memenuhi pelayanan kesehatan pada masyarakat di tentukan oleh jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dan kualitas yang di maksud berkaitan dengan pelayanan, tenaga, dan peralatan medis. Adapun jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di uraikan pada tabel berikut ini

Tabel 4.8 : Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Gambesi

No	JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH (unit)	PROSENTASE (%)
1	RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS	-	-
2	PUSKESMAS	1	25,00
3	PUSTU	-	-
4	POSYANDU	2	50,00
5	PRAKTEK DOKTER	1	25,00
6	APOTEK	-	-
7	TOKO OBAT	-	-
JUMLAH		4	100,00

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

Fasilitas kesehatan di Kelurahan Gambesi berdasarkan pada kebutuhan pelayanan akan kesehatan di rasakan masih kurang terutama prasarana Puskesmas. Berdasarkan pada standard Dirjen Perumahan dan Permukiman bahwa untuk

jumlah penduduk sekitar 17.771 di butuhkan tiga puskesmas dan dua puskesmas pembantu (pustu).



Gambar 4.4 Puskesmas dan Posyandu di Kelurahan Gambesi

6) Fasilitas Peribadatan

Sikap dan perilaku manusia dalam melaksanakan kehidupannya pada dasarnya dilandasi dengan keyakinan dan agama yang di anut serta menjadi pedoman yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Tabel 4.9 : Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Gambesi

No	JENIS FASILITAS PERIBADATAN	JUMLAH (unit)	PROSENTASE (%)
1	MESJID	3	75,00
2	MUSHOLLAH	1	25,00
	JUMLAH	4	100,00

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

Berdasarkan data tahun 2014 tercatat bahwa jumlah fasilitas peribadatan di Kelurahan Gambesi sebanyak 4 unit yang terdiri dari Mesjid 3 unit (75%) dan 1 unit Mushollah (25%), ini berarti fasilitas peribadatan di tiap lingkungan Kelurahan Gambesi sudah mencukupi.



Gambar 4.5 Mesjid dan Mushollah di Kelurahan Gambesi

7) Fasilitas Pelayanan Publik

Fasilitas pelayanan publik yang ada di Kelurahan Gambesi meliputi pelayanan pemerintahan berupa Kantor Kelurahan, sarana olah raga, dan sarana rekreasi.



Gambar 4.6 Kantor Kelurahan dan Lapangan Bola di Gambesi

8) Kondisi Prasarana dan Sarana

Aspek prasarana dan sarana merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah untuk mendukung pembangunan, mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka peningkatan pertumbuhan suatu wilayah. Aspek prasarana meliputi Jaringan jalan, sistem drainase, sistem sanitasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Ketersediaan sistem jaringan jalan menurut jenis permukaan di Kelurahan Gambesi terdiri dari jalan aspal, pengerasan, dan jalan tanah. Kondisi prasarana jalan tersebut

umumnya beraspal, sebagian lokasi menggunakan paving blok, dan juga ada sebagian yang masih jalan tanah.

Untuk sistem drainase yang di gunakan untuk sarana mengalirkan air buangan baik yang bersumber dari air hujan, dan air buangan rumah tangga. Sistem jaringan drainase di Kelurahan Gambesi terdiri dari drainase sekunder dan tersier dengan kondisi permanen dan temporer (tanah).

Sanitasi lingkungan di Kelurahan Gambesi terdiri dari sistem persampahan, pembuangan air kotor, maupun sistem MCK. Persampahan terdiri dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan rawa-rawa di jadikan sebagai pembuangan sampah, pembuangan air kotor sebagian menggunakan septiktank dan sebagian menggunakan rawa-rawa sebagai tempat pembuangan air kotor.

Sumber air bersih yang di gunakan masyarakat Kelurahan Gambesi bersumber dari PDAM, air tanah dangkal (sumur gali), dan air tanah dalam (sumur artesis).

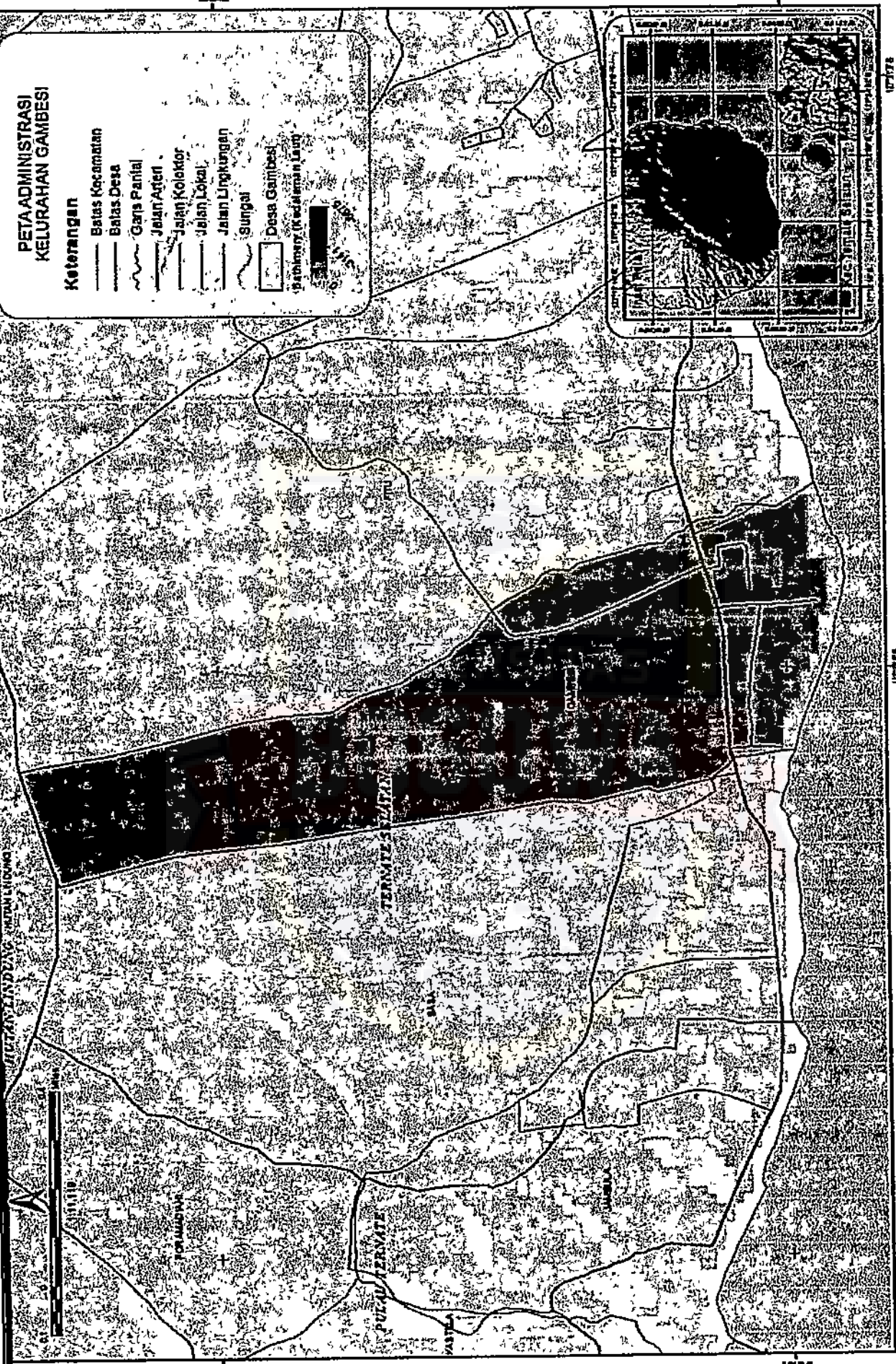
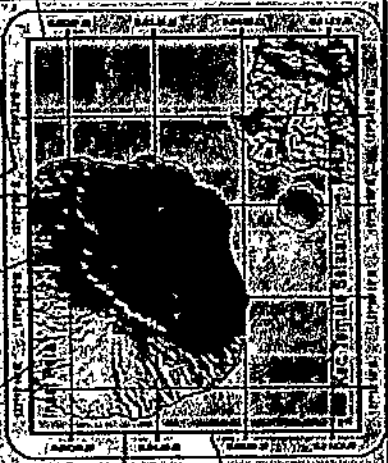
Jaringan listrik merupakan salah satu prasarana yang di butuhkan untuk menunjang penerangan rumah tangga, kegiatan industri, dan kegiatan lainnya, oleh karena itu listrik memegang peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan penerangan. Pemenuhan kebutuhan akan jaringan listrik di Kelurahan Gambesi dewasa ini sudah terlayani secara keseluruhan. Untuk jaringan telepon sambungan dari PT. Telkom masih kurang namun telepon seluler sudah dinikmati hampir seluruh masyarakat yang bermukim di Kelurahan Gambesi.

Berdasarkan pada data-data dan hasil survey di Kelurahan Gambesi dengan Empat Rukun Warga (RW) kondisi prasarana dan sarana masih kurang dan perlu penambahan dan perbaikan prasarana dan sarana yang mengalami kerusakan.

**PETA ADMINISTRASI
KELURAHAN GAMBESI**

Keterangan

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Sungai
- Desa Gambesi
- Batas Desa Kedeleman Laut



107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

107° 47' 00\"/>

4. Tinjauan Khusus Lingkungan Kawasan Kelurahan Gambesi Sebagai Lokasi Kegiatan Penelitian

a. Geografis

Secara administratif Kawasan Kelurahan Gambesi berada di Kecamatan Temate Selatan. Kondisi geografis Kelurahan Gambesi tersebut merupakan daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 0–67 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kelurahan Gambesi 1,56 Km², terdiri dari empat Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tengga (RT).

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Gambesi sebanyak 2.731 jiwa dengan 804 kepala keluarga dan kepadatan 1.751 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 : Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Gambesi
Menurut Jumlah Lingkungan/RW

No	Lingkungan/Rukun Warga	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	RW I	212	706	25,85
2	RW II	202	691	25,31
3	RW III	197	679	24,86
4	RW IV	193	655	23,98
JUMLAH		804	1.731	100,00

Sumber : Kelurahan Gambesi Dalam Angka, 2014

c. Tinjauan Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana

1) Jaringan Jalan

Jaringan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktifitas yang ada di lokasi penelitian. Dinamika kehidupan dan aktifitas warga Kelurahan Gambesi tergambar dari jaringan jalan yang ada di dalamnya. Jaringan jalan tersebut tidak hanya

berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menggambarkan aktifitas yang lebih luas.

Tabel 10.11 : Jenis Jalan, Lebar, Konstruksi, dan Kondisi Jalan
Kekurahan Gambesi

JALAN	LEBAR (m)	KONSTRUKSI	KONDISI JALAN	FASILITAS	ORIENTASI
Arteri	6	Aspal	Baik	Drainase	Terhubung
Kolektor	4	Paving Block	Baik	Drainase	Terhubung
Lokal	3	Tanah	Jelek	-	Terhubung

Beberapa permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan adalah adanya kerusakan jalan, dimensi jalan yang sempit, bagian penutup jalan rusak, genangan air di badan jalan, dan jalan yang berlobang, sehingga pada beberapa bagian jalan tersebut menimbulkan di ketidak nyamanan untuk melakukan aktifitas. Bahkan warga lingkungan Gambesi menengarai pada bagian tertentu sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan sulit dilalui. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a) Ruas jalan yang ada di lokasi penelitian yaitu terdiri dari jalan arteri sekunder, jalan lingkungan, jalan setapak, dan jalan tanah.
- b) Kondisi jalan yang ada terbagi dalam 4 (empat) jenis perkerasan jalan, yaitu : Perkerasan jalan aspal sebanyak 09 ruas jalan, jalan , jalan lingkungan sebanyak 5 ruas jalan dan jalan paving sebanyak 36 ruas jalan, jalan tanah 12 ruas.



Gambar 4.8 Kondisi Jaringan Jalan di Kelurahan Gambesi

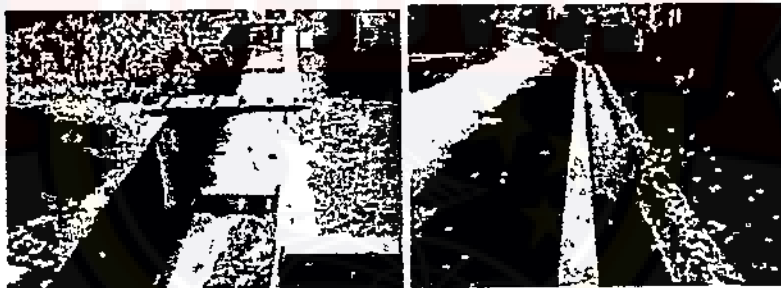
2) Jaringan Drainase

Meskipun di lokasi penelitian memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada kemiringan rendah terletak linear memanjang mengikuti beberapa pesisir pantai pada posisi 0 – 2 derajat, tetapi kenyataan sering terjadi permasalahan dengan jaringan drainase. Adanya banjir di beberapa bagian dan luapan air merupakan akibat yang ditimbulkan dari kondisi jaringan drainase. Kondisi ini sangat beragam, disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, aliran air di drainase tidak mengalir, dan sedimentasi saluran.

Drainase primer yang ada (drainase kota), sementara ini mengalami sedimentasi akibat pembuangan sampah liar oleh warga sendiri. Kawasan yang sangat rawan dan menjadi sasaran genangan air setiap kali hujan Kondisi ini menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan dan cukup mengganggu kelancaran aktivitas warga, meskipun belum dapat dikategorikan sebagai bencana.

Panjang saluran drainase di wilayah Gambesi adalah 1.054 meter. Wilayah RW 1 dan RW 2 memiliki jaringan drainase kota yang agak lebar, tetapi di wilayah RW 3 dan RW 4 yang sebagian drainasenya sempit.

- a. Panjang saluran drainase di wilayah RW 1 adalah 714 meter, lebar saluran drainase antara 20 cm – 35 cm.
- b. Panjang saluran drainase di wilayah RW 2 adalah 131,85 meter, lebar saluran drainase antara 25 cm sampai dengan 1 meter.
- c. Panjang saluran drainase di wilayah RW 3 adalah 105 meter, lebar saluran drainase antara 40 cm sampai dengan 1 meter.
- d. Panjang saluran drainase di wilayah RW 4 adalah 128 meter, lebar saluran drainase antara 40 cm sampai dengan 1 meter.



Gambar 4.9 Kondisi Jaringan Drainase Kelurahan Gambesi

3) Jaringan Air Bersih

Tingkat pelayanan air bersih adalah persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan air bersih baik yang di suplai oleh PDAM maupun berasal dari sumber air lain, termasuk sumber air lain setempat (sumur dangkal maupun sumur

dalam) atau berasal dari sumber lain di luar lingkungan yang dapat di perjual belikan melalui penjual air bersih (*water vendor*).

Dari data penggunaan air bersih untuk kebutuhan warga Masyarakat Kelurahan Gambesi terlihat bahwa sebagian besar warga menggunakan sumber air bersih PDAM dan sumur bor untuk pemenuhan kebutuhannya. Dari data terlihat bahwa sebanyak 120 unit rumah tinggal menggunakan sumber air bersih Sumur Bor dan PDAM. Namun ada juga masyarakat yang Beli Air Bersih dan sumur gali sebagai kebutuhan sehari-hari, artinya jaringan PDAM di gunakan untuk minum dan makan sementara sumur di gunakan untuk mandi dan mencuci.

4) Sistem Sanitasi Lingkungan

Salah satu indikator penilaian rumah tinggal bersih dan sehat adalah kepemilikan sistem sanitasi internal yang ada di dalam setiap lingkungan / kapling rumah. Karena sistem sanitasi yang buruk akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih luas. Sistem sanitasi yang dimaksud meliputi ketersediaan jamban internal/jamban keluarga, saluran pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tinggal, ketersediaan septic tank dan SPAL untuk bangunan publik atau bangunan yang menghasilkan limbah hasil produksi rumah tangga atau bangunan publik. Selain limbah pembuangan dari jamban, limbah hasil rumah tinggal yang lain adalah sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah

pada setiap unit bangunan dan lingkungan memberikan andil besar terhadap penilaian kebersihan dan kesehatan lingkungan.

a. Limbah Cair dan Limbah Padat

Sistem pembuangan limbah cair maupun limbah padat di lokasi penelitian masih belum memenuhi persyaratan dalam hal penyediaan prasarana dan sarana seperti pembuangan limbah cair yang menuju ke rioi kota maupun pembuangan limbah padat menuju ke septick tank.

b. MCK Umum

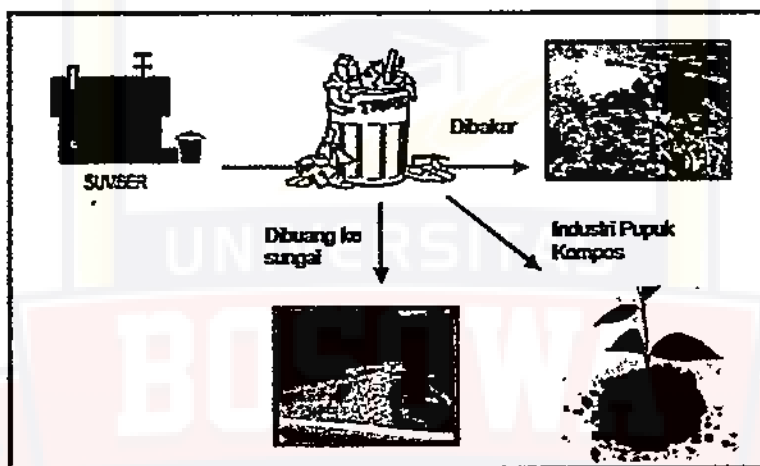
Kondisi sanitasi masyarakat belum memenuhi kelayakan. Pada umumnya warga masyarakat belum memiliki sarana dan prasarana MCK. MCK dan septic tank hanyalah milik kaum berduit saja, sedangkan bagi kalangan menengah ke bawah, meskipun ada yang memiliki MCK tetapi kondisinya belum memadai dengan konstruksi bangunan yang sangat sederhana. Namun anehnya, sebagian warga beranggapan bahwa sarana MCK belum menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena masih banyaknya lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat buang air besar dengan sistem gali lubang dan Wc terbang (dibuang ke empang).

c. Persampahan

Masyarakat di Lingkungan kawasan Kelurahan Gambesi umumnya masih membuang sampah di sembarang tempat atau dengan cara dikumpulkan di lahan kosong lalu

dibakar. Selain itu, sebagian warga yang bermukim di sekitar sungai atau empang menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.

Sehingga persoalan persampahan di lokasi penelitian masih di perlukan penanganan, hal ni di sebabkan karena tidak adanya prasarana persampahan yang di sediakan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah.



Gambar 4. 10. Skema persampahan di Kelurahan Gambesi

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS KETERSEDIAAN DAN MANFAAT PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DI KELURAHAN GAMBESI KECAMATAN TERNATE SELATAN KOTA TERNATE

1. Deskripsi Identitas Responden

Responden yang merupakan sumber utama data primer di dalam penelitian ini sangat perlu diketahui identitasnya, sebab banyak informasi penunjang yang dapat diperoleh dan dapat dijadikan pertimbangan dalam analisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Kelurahan Gambesi dengan jumlah responden 120 Kepala Keluarga. (lihat bab 3 populasi dan sampel).

Untuk kebutuhan analisis data responden akan dipaparkan beberapa aspek yang meliputi: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan dan tingkat pendapatan. Aspek-aspek tersebut diambil berdasarkan jawaban kuesioner dari responden pada lokasi sampel penelitian.

Aspek pertama berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKWENSI	PROSENTASE
		(f)	(%)
1	LAKI-LAKI	54	45,00
2	WANITA	66	50,00
	JUMLAH	120	100

Sumber: Hasil olahan kuisisioner 2014

Dari tabel 5.1 memperlihatkan bahwa dari 120 KK yang dijadikan sampel penelitian jumlah responden jenis kelamin laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Adapun responden perempuan statusnya sebagai janda baik akibat perceraian dengan suami maupun karena suaminya sedang melaut/berkebun sehingga pada saat dijadikan responden dalam penelitian ini statusnya adalah menggantikan peran suami untuk menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	FREKWENSI (f)	PROSENTASE (%)
1	Kurang dari 30	31	25,83
2	31 - 35	25	20,83
3	36 - 40	23	19,17
4	41 - 45	7	5,83
5	46 - 50	9	7,50
6	51 - 55	19	15,83
7	56 tahun Keatas	6	5,00
Jumlah		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa umur responden di dua lokasi penelitian dari kategori usia responden terbanyak berusia kurang dari 30 tahun. Ini berarti umur yang dominan dalam wilayah sampel responden adalah umur yang produktif dan sangat membutuhkan banyak aktivitas keseharian, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan maupun sebagai kepala rumah tangga.

Dalam penelitian ini selain kondisi topografi, demografi, dan lingkungan juga di analisis tingkat pendidikan yang merupakan salah satu faktor penentu kualitas kehidupan dan sarana yang

efektif mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada aspek peningkatan produktifitas kerja. Selain itu, dengan latar belakang tingkat pendidikan relatif tinggi yang dimilikinya tersebut tentu akan mempengaruhi dalam sikap, perilaku, dan pola pikir bagi Masyarakat. Adapun yang dimaksudkan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang pernah diperoleh oleh masyarakat. Selanjutnya, penjelasan mengenai kondisi masyarakat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKWENSI (f)	PROSENTASE (%)
1	TDK SEKOLAH/TDK TAMAT	14	11,67
2	SEKOLAH DASAR	22	18,33
3	SLTP	34	28,33
4	SLTA	39	32,50
5	SARJANA/PERGURUAN TINGGI	11	9,17
JUMLAH		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Dari tabel 5.3 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Gambesi secara umum masih kurang. Hal ini juga ditunjukkan pada banyaknya jumlah masyarakat dengan latar belakang pendidikan hanya sampai pada sekolah dasar bahkan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sebanyak 14 orang atau 11,67% dari 120 jumlah sampel penelitian. Sedangkan jumlah paling tinggi dilihat dari aspek tingkat pendidikan responden adalah responden yang pernah mengcap pendidikan hingga bangku tingkat SLTA yaitu sebanyak 39 orang atau 32,50%. Kurangnya

masyarakat untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi disebabkan karena aspek social dan ekonomi masyarakat Kelurahan Gambesi yang tak memungkinkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Hal ini karena aktivitas kesibukan dalam bekerja yang telah banyak menyita waktu disamping kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Responden

Kondisi sosial ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, dan tingkat pendapatan masyarakat pada lokasi penelitian. Pekerjaan pokok sebagai sumber penghasilan utama dan pekerjaan sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi pekerjaan responden ini bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan seperti: petani, wiraswasta, nelayan, buruh bangunan, pedagang/jualan, pegawai swasta, dan pegawai negeri.

Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pokok

NO	PEKERJAAN POKOK	FREKWENSI (f)	PROSENTASE (%)
1	PEGAWAI NEGERI	4	3,33
2	PEGAWAI SWASTA	1	0,83
3	WIRASWASTA	17	14,16
4	PEDAGANG	16	13,33
5	PENSIUNAN	6	5,00
6	PETANI	27	22,50
7	NELAYAN	21	17,50
8	BURUH BANGUNAN	9	7,50
9	TIDAK BEKERJA	8	6,67
10	IRT	11	9,17
	JUMLAH	120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014



Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pekerjaan pokok yang mendominasi dari jawaban responden adalah petani dan nelayan untuk kedua lokasi sampel penelitian. Pekerjaan pokok terbesar adalah petani dan nelayan karena didasarkan wilayah geografis lokasi yang merupakan area pesisir pantai sehingga menangkap ikan di jadikan sebagai sumber pendapatan utama dalam keluarga, adapun petani yang juga di jadikan sebagai pekerjaan pokok karena sebagian masyarakat (16,36%) memiliki area persawahan atau lahan garapan.



Gambar 5.1 : Distribusi pekerjaan Pokok Masyarakat

Selain pekerjaan pokok yang telah dibahas sebelumnya, masyarakat dilokasi penelitian juga mempunyai usaha/pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok seperti terlihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan

NO	PEKERJAAN SAMPINGAN	FREKWENSI	PROSENTASE
		(f)	(%)
1	PEGAWAI NEGERI	0	0
2	PEGAWAI SWASTA	0	0
3	WIRASWASTA	13	10,83
4	PEDAGANG	11	9,17
5	PENSIUNAN	5	4,17
6	PETANI	21	17,50
7	OJEK	12	10,00
8	BURUH BANGUNAN	5	4,17
9	TIDAK ADA	28	23,33
10	LAINNYA/IRT	24	20,83
JUMLAH		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Pekerjaan sampingan dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga yang kurang mencukupi, sebagian besar masyarakat lokal hanya mengandalkan pada lapangan pekerjaan pokok. Seperti yang terlihat pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa pekerjaan sampingan didominasi oleh yang tidak memiliki pekerjaan sampingan dan ibu rumah tangga. Pekerjaan sampingan maupun pekerjaan pokok tidak mempunyai perbedaan yang signifikan hal ini disebabkan karena pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan hampir sama kedudukannya dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari seperti pekerjaan pokok petani, pekerjaan sampingan adalah wiraswasta, pekerjaan sampingan petani, pekerjaan pokok nelayan.

Tabel 5.6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

NO	TINGKAT PENDAPATAN/ BULAN	FREKWENSI	PROSENTASE
		(f)	(%)
1	<Rp. 500.000	37	32,50
2	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	48	42,50
3	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	16	15,83
4	> Rp 2. 000.000	3	9,17
JUMLAH		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Tabel 5.6 menunjukkan keadaan Responden menurut tingkat pendapatan keluarga di kawasan penelitian yang dikategorikan dalam empat kelompok yaitu Sangat rendah (<Rp500.000/bulan), rendah (Rp.500.000–1.000.000/bulan), sedang (Rp.1.000.000–2.000.000/bulan) dan tinggi (> Rp. 2.000.000/bulan) dengan rata-rata jumlah tanggungan kepala keluarga sekitar 4- 5 orang.

Dari hasil analisis sampel penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Gambesi berkisar Rp.500.000 – 1.000.000/bulan

Minimnya tingkat pendapatan masyarakat di lokasi penelitian karena rata-rata masyarakat hanya mempunyai satu pekerjaan pokok seperti petani atau buruh bangunan, yang mana sumber pendapatan tersebut bersifat musiman dan tidak ada kepastian pendapatan tetap yang diperoleh setiap bulannya. Lain halnya dengan jumlah responden dengan tingkat pendapatan Rp. 1.000.000–Rp.2.000.000 hal ini di tunjang dengan beberapa pendapatan sampingan seperti usaha jualan, warung (wiraswasta) dan sebagai buruh bangunan di proyek-proyek.

Dengan adanya program-program pemerintah untuk pembangunan perdesaan seperti program pembangunan infrastruktur perdesaan sangat membantu masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan, berdasarkan wawancara dengan responden umumnya mereka sangat antusias dengan program tersebut dengan alasan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan

desanya dan juga mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan tersebut dan tidak jauh-jauh lagi mencari pekerjaan di kota sebagai buruh bangunan sehingga ketika ada program mereka yang bekerja sebagai petani, pedagang, wiraswasta, nelayan, ojek dan lainnya dapat juga bekerja sambilan di program tersebut.

Dalam pelaksanaan fisik infrastruktur dapat di jadikan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses-akses peningkatan pendapatan/penghasilan bagi masyarakat desa sehingga wilayah perdesaan dapat berkembang dan maju sebagai bagian dari aspek pengembangan wilayah.

3. Analisis Ketersediaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Gambesi

Pada bagian ini akan di bahas mengenai ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di lokasi penelitian. Analisis ketersediaan prasarana dan sarana meliputi jalan, drainase, sanitasi lingkungan, air bersih, dan sistem persampahan

a. Jalan

Jaringan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktifitas yang ada di lokasi penelitian. Dinamika kehidupan dan aktifitas warga Gambesi tergambar dari jaringan jalan yang ada di dalamnya. Jaringan jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menggambarkan aktifitas yang lebih luas. Aktifitas budaya, sosialisasi, kontak sosial, keagamaan dan lainnya. Hal ini tergambar dari aktifitas yang terjadi pada bagian

jalan tertentu. Di mana anak-anak memanfaatkannya sebagai media permainan, sebagian orang menggunakannya untuk media perdagangan, dan kontak sosial, Tetapi pada bagian lain ruas jalan tidak digunakan apapun karena tidak banyak aktifitas pada bagian tertentu.

Ketersediaan jalan lingkungan dan jalan setapak di dalam kawasan ini adalah sangat tinggi. Jika melihat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang permukiman dan pengembangan wilayah (tahun 2000).

Tabel 5.7. Standard Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Jaringan Jalan Bidang Permukiman

Jaringan Jalan		
a. Jalan Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan/jumlah penduduk - Kecepatan rata-rata (waktu tempuh) - Luas jalan/luas kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan 0,6 km/1.000 penduduk - Ratio luas jalan 5% dari ruas wilayah
b. Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m
c. Jalan Setapak	<ul style="list-style-type: none"> - Ratio panjang jalan dengan luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang 50-100 m/Ha dengan lebar 0,8-2

Sumber : SNI Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2007

Adapun analisis ketersediaan panjang jalan lingkungan maupun setapak di sesuaikan dengan SPM kemudian di adakan survey dan pengumpulan data berdasarkan pada kondisi eksisting jalan yang sudah ada yang dapat di lihat pada tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8: Perbandingan Antara Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak dengan Standard SPM

No	Klasifikasi Jalan	Standar Minimal (m/ha)	Standard Minimal Kebutuhan (m/7,5 ha)	Panjang Jalan	
				(m)	%
1	Jalan Lingkungan	40 - 60	300 - 450	423,58	94,13
2	Jalan Setapak	50 - 110	375 - 825	519,63	62,99

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Dari hasil perbandingan panjang jalan lingkungan dan jalan setapak dengan kondisi eksisting menunjukkan bahwa ketersediaan jalan berdasarkan pada panjang jalan lingkungan di kategorikan sangat baik berdasarkan pada standard minimal yang telah di tetapkan.

Sementara untuk jalan setapak yang ada di lokasi penelitian prosentase terhadap standard minimal adalah 62,99%, ini menunjukkan bahwa ketersediaan jalan setapak di lokasi penelitian di kategorikan cukup baik, hal ini juga di kaitkan dengan penilaian masyarakat berdasarkan pada hasil wawancara dan analisis kuisioner terhadap ketersediaan prasarana jalan lingkungan maupun jalan setapak juga sudah cukup baik (37,50%)

Tabel 5.9: Penilaian Masyarakat Terhadap Kondisi Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak

No	Panjang Jalan	Bobot	Frekwensi (f)	Nilai	Prosentase (%)	Rata-Rata		KLASIFI KASI
						Skor	Persen	
1	Sangat Baik	5	16	80	13,33	0,667	13,33	
2	Baik	4	27	108	22,50	0,900	18,00	
3	Cukup Baik	3	45	135	37,50	1,125	22,50	
4	Kurang Baik	2	21	42	17,50	0,350	7,00	
5	Tidak Baik	1	11	11	9,17	0,091	1,83	
JUMLAH			120	376	100	3,133	62,67	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Selain panjang jalan lingkungan yang di analisis terhadap standard pelayanan minimal (SPM), lebar badan jalan dan perkerasan jalan juga di lakukan analisis perbandingan terhadap SPM.

Untuk lebar badan jalan lingkungan sesuai standard yang di butuhkan adalah 3,5 – 5 m dan lebar perkerasan jalan lingkungan 3 – 4,5 m, sesuai pengamatan di lapangan ketersediaan lebar badan jalan eksisting di kategorikan kurang baik dan lebar perkerasan jalan di kategorikan baik. Tabel 5.10 menunjukkan bahwa prosentase lebar badan jalan lingkungan yang sesuai atau lebih besar dari standard (3,5 m), dengan lebar badan jalan yang ada yaitu 4 m – 6 m adalah 57,04%, sedang yang kurang dari standard 42,95%.

Untuk lebar perkerasan jalan yang sesuai atau lebih besar dari standard (3 m), dengan lebar perkerasan yang ada yaitu 3 – 6 m adalah 86,73%, dan kurang baik dari standard (2,5 m) adalah 13,26%.

Tabel 5.10: Perbandingan Antara Lebar Badan Jalan dan Perkerasan Jalan dengan Standard SPM Tahun 2007

No	Klasifikasi Jalan	Standar Lebar Jalan Minimum (m)	Lebar Badan Jalan Yang Ada (m)	Standard Lebar Minimal Perkerasan (m)	Lebar Perkerasan Jalan Yang Ada (m)	Panjang Jalan Eksisting	
						(m)	%
1	Jalan Sekunder	7	5	6,5	5	133,2	100
	JUMLAH					132,2	100
2	Jalan Lingkungan	3,5 – 5	6	3 – 4,5	5	65,76	15,52
			6		5	120,40	28,42
			5		5	55,50	13,10
			4		4	75,00	17,71
			3		3	50,75	11,98
			2,5		2,5	56,17	13,26
	JUMLAH					423,58	100
3	Jalan Setapak	2 – 3,5	1,5	1,5	1,5	142,30	27,38

		1		1	263,90	50,79
		0,8		0,8	113,43	21,83
JUMLAH					519,63	100

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa kebutuhan untuk lebar badan jalan setapak sesuai standard (2 m – 3,5 m) dan lebar perkerasan jalan (1,5 m) sesuai hasil pengamatan dan analisis data menunjukkan bahwa ketersediaan lebar badan jalan maupun lebar perkerasan di kategorikan kurang baik karena kondisi eksisting (1,5 m) prosentasenya hanya 27,38%, sedang selebihnya yaitu 72,62% tidak sesuai dengan standard minimal (SPM), hal ini juga di sinkronkan dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi lebar jalan lingkungan maupun setapak (tabel 5.11) dengan kategori kurang baik (28,33%).

Tabel 5.11: Penilaian Masyarakat Terhadap Kondisi Lebar Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak

No	Lebar Jalan	Bobot	Frekwensi	Nilai	Prosentase	Rata-Rata		KLASIFIKASI
			(f)		(%)	Skor	Persen	
1	Sangat Baik	5	11	55	9,17	0,458	9,167	Kurang Baik
2	Baik	4	16	64	13,33	0,533	10,667	
3	Cukup Baik	3	41	123	34,17	1,025	20,500	
4	Kurang Baik	2	34	68	28,33	0,567	11,333	
5	Tidak Baik	1	18	18	15,00	0,150	3,333	
JUMLAH			120	328	100	2,733	54,667	

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Untuk material perkerasan jalan lingkungan di lokasi penelitian ketersediannya sudah cukup baik karena keseluruhan jalan lingkungan yang ada telah di perkeras dengan material berupa aspal dan paving block dimana paving block sebanyak 56,21% dan aspal sebanyak 43,79%, sedangkan untuk jalan setapak dari 519,63 m panjang jalan, material perkerasan jalan

sudah baik berupa paving blok sebanyak 46,76%, rabat beton sebanyak 25,53%, dan jalan tanah sebanyak 27,71%.

Tabel 5.12: Material Permukaan Jaringan Jalan di Lokasi Penelitian

No	Klasifikasi Jalan	Material Permukaan	Panjang Jalan Yang Ada	
			(m)	%
1	Jalan Kolektor Sekunder	Aspal	132,20	100
	Jumlah		132,20	100
2	Jalan Lingkungan	Aspal	185,50	43,79
		Paving Block	238,08	56,21
	Jumlah		423,58	100
3	Jalan Setapak	Paving Block	243,00	46,76
		Rabat	132,64	25,53
		Tanah	143,99	27,71
	Jumlah		519,63	100

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Untuk material perkerasan jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian masih perlu perbaikan di beberapa ruas jalan terutama yang masih berupa perkerasan jalan tanah dan juga sebagian jalan tidak dilengkapi dengan drainase pada sisi kiri kanan jalan.

b. Sistem Drainase

Adapun penilaian tingkat ketersediaan drainase di tinjau dari dimensi dan panjang saluran serta kondisi drainase. Pada lokasi penelitian, ketersediaan drainase di tinjau dari panjangnya termasuk kategori cukup baik dari standard minimal yang di tetapkan yaitu 120 – 250 m/ha.

Tabel 5.13: Perbandingan Antara Panjang Jaringan Drainase dengan Standard SPM

No	Standard/ha (m)	Standar Kebutuhan 7,5 ha/m	Panjang Saluran Eksisting (m)	Prosentase Terhadap Standard %
1	150 - 250	950 - 1875	1.054,15	56,22

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2014

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa kebutuhan untuk prasarana drainase di lokasi penelitian dengan luas wilayah 1,56 Km sesuai dengan SPM adalah 900 m sampai dengan 1.875 m, sedangkan ketersediaan panjang drainase yang ada pada lokasi penelitian adalah 1054,15 m (56,22%). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan panjang drainase yang ada di kategorikan kurang baik.

Sesuai pengamatan di lapangan, saluran primer yang terdapat pada batas antara Kelurahan Gambesi dan Sasa, yang selain berfungsi sebagai saluran pembuangan juga di manfaatkan sebagai tempat membuang sampah oleh warga sepanjang saluran tersebut yang aliran airnya langsung ke laut, sementara saluran tersier yang ada di lingkungan permukiman umumnya tidak dapat berfungsi maksimal, di samping karena dimensi yang tidak sesuai dengan standard juga karena kondisi fisik saluran sudah banyak yang rusak.

Saluran yang ada di lokasi penelitian juga banyak yang tidak berfungsi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang kurang dengan membuang sampah pada saluran yang ada, sehingga membuat saluran tersumbat oleh adanya tumpukan sampah yang menyumbat pada ujung saluran sehingga air buangan tidak dapat mengalir.

Berdasarkan dimensi yaitu lebar drainase, untuk ketersediaan yang ada pada lokasi penelitian dapat di

kategorikan kurang baik, sesuai dengan pengamatan di lapangan, lebar drainase yang sesuai atau lebih besar dari standard (30 cm) dengan lebar 30 cm sampai dengan 60 cm prosentasenya hanya mencapai 37,94% sementara drainase yang lebarnya lebih kecil dari standard (20 cm) mencapai 62,06%.

Untuk dimensi tinggi atau dalam drainase yang ada pada lokasi penelitian, yang sesuai atau lebih besar dari standard (40 cm) dengan kedalaman 40 cm sampai dengan 50 cm hanya mencapai 28,39%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana dan sarana untuk tinggi (dalam) drainase di kategorikan tidak baik.

Tabel 5.14: Perbandingan Lebar Sistem Drainase Terhadap Standard SPM

No	Lebar		Panjang Eksisting Lokasi (m)	Prosentase Terhadap Total Panjang
	Eksisting Lokasi (m)	Standard (m)		
1	0,60	0,30	175,0	16,60
2	0,50	0,30	124,30	11,79
3	0,30	0,30	100,64	9,55
4	0,20	0,30	654,21	62,06
JUMLAH			1054,15	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis tahun 2014

Tabel 5.15: Perbandingan Dalam/Tinggi Sistem Drainase Terhadap Standard SPM

No	Dalam/Tinggi		Panjang Eksisting Lokasi (m)	Prosentase Terhadap Total Panjang
	Eksisting Lokasi (m)	Standard (m)		
1	0,50	0,40	175,0	16,60
2	0,40	0,40	124,30	11,79
3	0,20	0,40	754,85	71,61
JUMLAH			1054,15	100

Sumber : Hasil Survey dan Analisis tahun 2014

Pada lokasi penelitian, permukiman yang ada pada pesisir pantai sama sekali tidak mempunyai saluran pembuangan, juga pada jalan lingkungan yang ada hanya sebagian saja yang mempunyai saluran pada dua sisinya, sehingga permukiman yang tidak mempunyai saluran pembuangan utamanya permukiman daerah pesisir pantai, mengakibatkan air buangan tidak dapat mengalir yang pada akhirnya menimbulkan genangan di kawasan tersebut.

Tabel 5.16: Penilaian Masyarakat terhadap Ketersediaan Jaringan Drainase Berdasarkan pada Lebar dan Tinggi Drainase

No	Lebar Jalan	Bobot	Frekwensi	Nilai	Prosentase	Rata-Rata		KLASIFI KASI
			(f)		(%)	Skor	Persen	
1	Sangat Baik	5	11	55	9,17	0,458	9,167	
2	Baik	4	16	64	13,33	0,533	10,667	
3	Cukup Baik	3	31	93	25,83	0,775	15,500	
4	Kurang Baik	2	45	90	37,50	0,750	15,000	
5	Tidak Baik	1	17	17	14,17	0,142	2,833	
JUMLAH			120	319	100	2,658	53,176	Kurang Baik

Sumber: Hasil Survey dan Analisis tahun 2014

Pada jalan setapak yang ada saluran tersedia hanya pada satu sisi jalan, malah ada beberapa jalan setapak yang sama sekali tidak mempunyai saluran pembuangan dan air buangan dari rumah di alirkan melalui saluran tanah, sehingga menimbulkan genangan pada daerah sekitarnya.

c. Jaringan Air Bersih

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga dan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Oleh karena lingkungan permukiman harus mendapatkan pasokan air bersih yang cukup dari sistem

jaringan kota, atau jika tidak terdapat jaringan kota maka harus di usahakan dari sumber lain yang memenuhi persyaratan air bersih.

Secara umum kondisi ketersediaan jaringan air bersih pada lokasi penelitian dapat di kategorikan masih kurang baik karena sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan air bersih.

Tabel 5.17. Klasifikasi Sumber Air Bersih di Kelurahan Gambesi

No	Lingkungan	SUMBER AIR BERSIH				JUMLAH
		PDAM	Sumur	Sumur Bor	Beli Air Bersih	
1	RW I	6	5	10	9	30
2	RW II	3	9	8	10	30
3	RW III	2	13	9	6	30
4	RW IV	-	17	7	6	30
JUMLAH		11	44	34	31	120

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2011

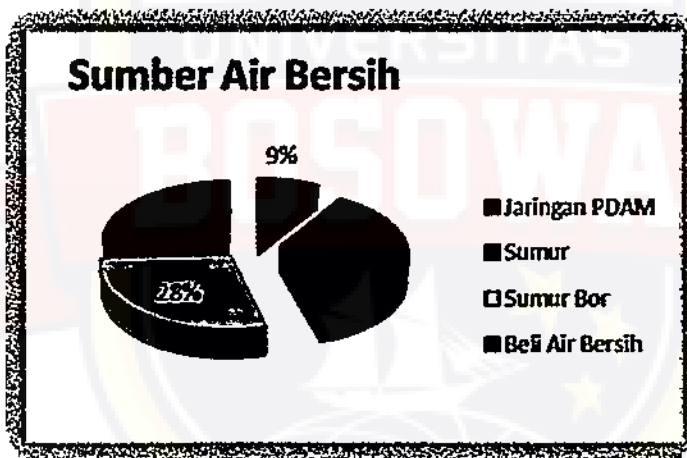
Untuk Penggunaan sumur juga banyak di gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari Khususnya di lingkungan RW IV sebanyak 17 unit rumah, dan di lingkungan RW III sebanyak 13 rumah. Dari penggalian potensi dan permasalahan di tingkat masyarakat, terungkap bahwa sebagian besar permasalahan sistem distribusi air bersih PDAM adalah kemampuan ekonomi untuk menjadi pelanggan PDAM.

Tabel 5.18. Klasifikasi Ketersediaan Sumber Air Bersih di Lokasi Penelitian

NO	Kondisi Prasarana Sumber Air Bersih	Responden	
		Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Jaringan PDAM	11	9,17
2	Sumur	44	36,67
3	Sumur Bor	34	28,33
4	Beli Air Bersih	31	25,83
JUMLAH		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Berdasarkan hasil analisis data responden di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pemakaian sumber air bersih rata-rata menggunakan sumur artesis sebagai kebutuhan sehari-hari yaitu 44 responden atau 35,67%, sedangkan sumber air bersih dari jaringan PDAM sebanyak 11 responden atau 9,17%. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih di lokasi penelitian masih kurang dan perlu perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten, adapun pemakaian air bersih baik yang bersumber dari sumur, maupun yang bersumber dari sumur bor kurang baik untuk di gunakan baik dari segi rasa maupun bau.



Gambar 5.2 : Kondisi Eksisting berdasarkan Pada Sumber Air Bersih
Sumber : Hasil Analisis Data Primer (2014)

d. Sistem Sanitasi Lingkungan

Salah satu indikator penilaian rumah tinggal bersih dan sehat adalah kepemilikan sistem sanitasi internal yang ada di dalam setiap lingkungan / kapling rumah. Karena sistem sanitasi

yang buruk akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih luas. Sistem sanitasi yang dimaksud meliputi ketersediaan saluran pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tinggal, ketersediaan septic tank dan SPAL untuk bangunan publik atau bangunan yang menghasilkan limbah hasil produksi rumah tangga atau bangunan publik. Selain limbah pembuangan dari jamban, limbah hasil rumah tinggal yang lain adalah sampah. Ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan pada setiap unit bangunan dan lingkungan memberikan andil besar terhadap penilaian kebersihan dan kesehatan lingkungan.

1)Pembuangan Limbah Cair

Tabel 5.19. Klasifikasi Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi Penelitian

NO	Lingkungan	SANITASI LINGKUNGAN (PEMBUANGAN LIMBAH CAIR)				JUMLAH
		Selokan	Septick tank	Tanah	Empang/rawa	
1	RW I	17	11	2	-	30
2	RW II	14	8	6	2	30
3	RW III	12	6	12	-	30
4	RW IV	5	2	20	3	30
JUMLAH		48	27	40	5	120

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

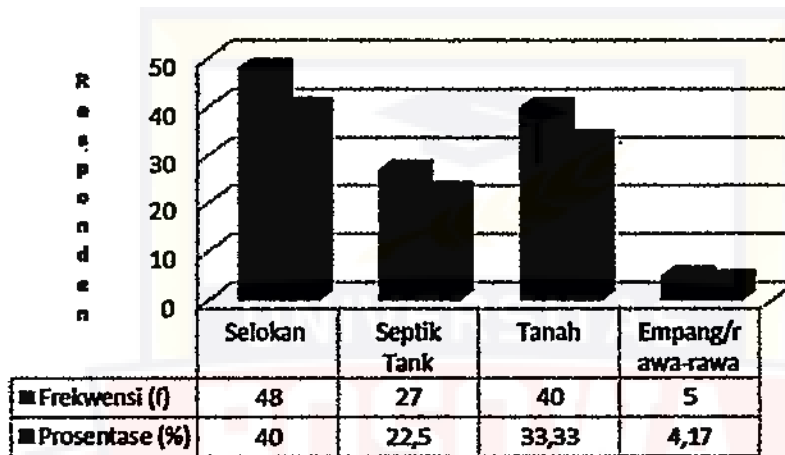
Berdasarkan pada hasil analisis data responden di lokasi penelitian menunjukkan bahwa untuk kondisi pembuangan limbah cair 40,00% masyarakat membuang limbah cairnya ke septick tank, 33,33% mengalirkan limbah cairnya ke selokan, dan 22,50% membuang ke tanah.

Tabel 5.20. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi Penelitian

NO	Kondisi Prasarana Pembuangan Limbah Cair	Responden	
		Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Selokan	48	40,00
2	Septik Tank	27	22,50
3	Tanah	40	33,33
4	Empang/rawa-rawa	5	4,17
JUMLAH		120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Pembuangan Air Limbah



Gambar 5.3 : Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Sampah

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

2) Pembuangan Limbah Padat

Kondisi sanitasi masyarakat belum memenuhi kelayakan. Pada umumnya warga masyarakat belum memiliki sarana dan prasarana MCK. Meskipun ada yang memiliki MCK tetapi kondisinya belum memadai dengan konstruksi bangunan yang sangat sederhana. Namun anehnya, sebagian warga beranggapan bahwa sarana MCK belum menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena masih banyaknya

lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat buang air besar dengan sistem gali lubang.

Tabel 5.21. Klasifikasi Ketersediaan Pembuangan Limbah Padat di Lokasi Penelitian

Lingkungan	SANITASI LINGKUNGAN (PEMBUANGAN LIMBAH PADAT)						JUMLAH
	Selokan	Septik Tank	Tanah	Empang	Rawa-rawa	WC Umum	
Kelurahan Gambesi	39	28	37	5	-	11	120

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa di lokasi penelitian, sistem sanitasi lingkungan dalam hal ini pembuangan limbah padat di salurkan atau di buang ke selokan karena masyarakat rata belum memiliki septiktank. Untuk di lingkungan Gambesi karena sebagian masyarakatnya adalah petani sehingga mereka rata-rata belum memiliki saluran pembuangan ke septic tank.



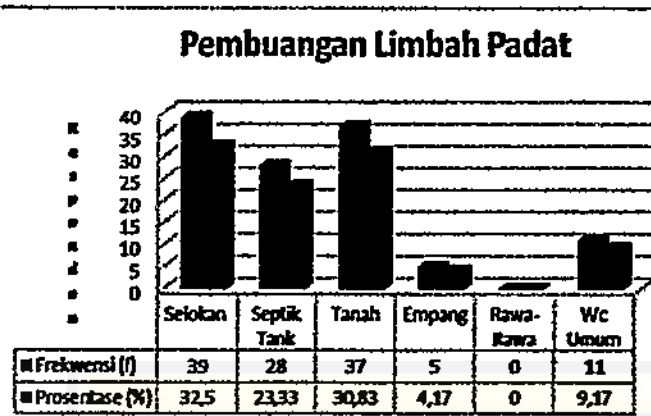
Tabel 5.22. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Padat di Lokasi Penelitian

NO	Kondisi Prasarana	Responden	
	Pembuangan Limbah Padat	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Selokan	39	32,50
2	Septik Tank	28	23,33
3	Tanah	37	30,33
4	Empang	5	4,17
5	Rawa-Rawa	-	-
6	Wc Umum	11	9,17
	JUMLAH	120	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Adapun presentase ketersediaan pembuangan limbah padat di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 30,00% pembuangan limbah padat ke selokan dan 4,17% membuang limbah padatnya ke empang, ini menunjukkan bahwa di lokasi

penelitian ketersediaan sistem pembuangan limbah padat masih sangat kurang.



Gambar 5.4 : Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Limbah Cair
 Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

3)MCK Umum

Faktor sanitasi lingkungan permukiman sangat berpengaruh terhadap tingkat kebersihan dan kesehatan masyarakat yang ada di permukiman tersebut. Di lokasi penelitian yang umumnya adalah masyarakat petani umumnya tidak memperhatikan faktor sanitasi lingkungan.

Tabel 5.23. Klasifikasi Ketersediaan MCK Umum di Lokasi Penelitian

NO	Lingkungan	SANITASI LINGKUNGAN (MCK)			JUMLAH
		MCK	SUMUR UMUM	WC UMUM	
1	RW I	3	2	2	7
2	RW II	2	2	4	8
3	RW III	1	4	2	7
4	RW IV	2	3	3	8
JUMLAH		8	11	11	30

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Dari tabel 5.23 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sistem sanitasi lingkungan di lokasi penelitian dalam hal ini Mandi, Cuci, Kakus (MCK) masih kurang, ini bisa di

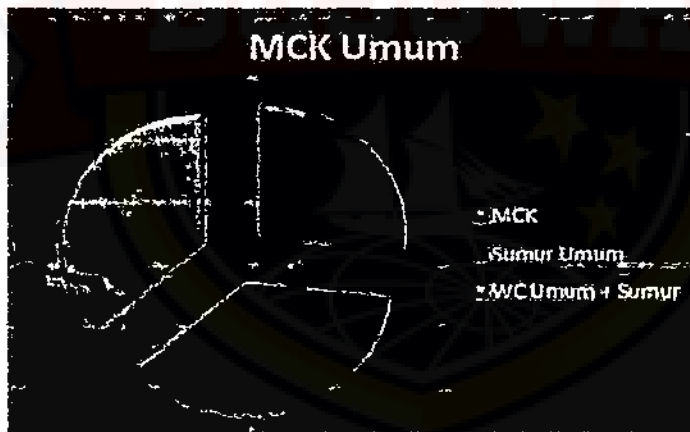
bandingkan dengan jumlah penduduk di lokasi penelitian dan ketersediaan sanitasi di tiap rumah.

Tabel 5.24. Tingkat Ketersediaan MCK Umum di Lokasi Penelitian

NO	Kondisi Ketersediaan Prasarana	Responden	
	MCK	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	MCK	8	26,67
2	Sumur Umum	11	36,67
3	WC Umum + Sumur	11	36,67
	JUMLAH	30	100

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Dari tabel 5.24 menunjukkan bahwa jumlah MCK umum di lokasi penelitian sebanyak 8 buah, sumur umum sebanyak 11 buah, dan Wc umum dengan sumur sebanyak 11 buah. Untuk prasarana MCK umum dari 8 buah yang tersedia, hanya 3 yang dapat di fungsikan sementara yang lainnya telah mengalami kerusakan dan tidak tersedia jaringan air bersih maupun sumur.



Gambar 5.5 : Kondisi Eksisting Sanitasi MCK di Lokasi Penelitian
Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

4)Pembuangan Sampah

Masyarakat Kelurahan Gambesi pada umumnya masih membuang sampah di sembarang tempat atau dengan cara dikumpulkan di lahan kosong lalu dibakar. Selain itu, sebagian warga yang bermukim di sekitar Sungai dan tepi pantai menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.

Tabel 5.25. Prosentase Ketersediaan Pembuangan Limbah Cair di Lokasi Penelitian

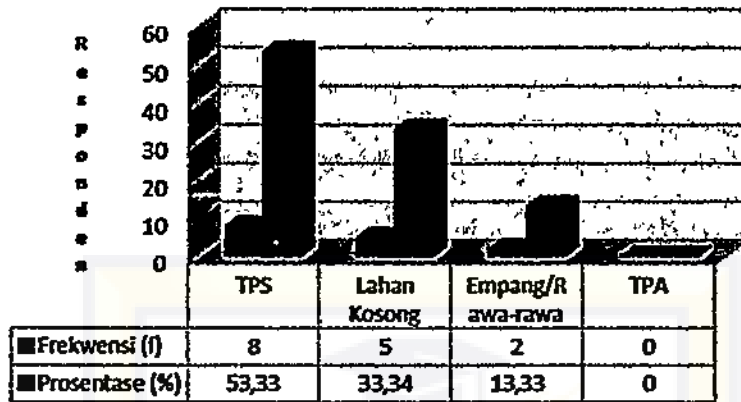
NO	Kondisi Ketersediaan Prasarana Pembuangan Sampah	Responden	
		Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	TPS	8	50,00
2	Lahan Kosong	5	31,25
3	Empang/Rawa-rawa	2	12,50
4	TPA	-	-
JUMLAH		16	100,00

Sumber: Hasil olahan kuisioner 2014

Dari tabel 5.25 tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana pembuangan sampah di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di lokasi penelitian sebanyak 8 unit atau 50%, sementara lahan kosong yang di jadikan sebagai tempat pembuangan sampah sebanyak 5 lokasi atau 31,25%. Data untuk pembuangan sampah pada daerah sungai atau pantai menurut hasil survey lokasi berada pada semua daerah tersebut, karena permukiman masyarakat yang berada di sekitar pesisir langsung saja membuang sampahnya di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ketersediaan sistem pembuangan sampah, dalam hal ini TPS sudah dalam kategori baik, hanya saja perlu penyadaran dari masyarakat

agar tidak membuang sampahnya di sungai, pantai atau tanah kosong.

Pembuangan Sampah



Gambar 5.6 : Prosentase Ketersediaan Prasarana Pembuangan Sampah

Tabel 5.26: Standard Peralatan dan Kapasitas Pelayanan Persampahan

No	Jenis Peralatan	Kapasitas Pelayanan			Umur Teknis (tahun)
		Volume	KK	Jiwa	
1	Wadah Komunal	0,5 – 1,0 m ³	20 - 40	100 - 200	-
2	Komposter Komunal	0,5 – 1,0 m ³	10 - 20	50 - 100	-
3	Alat Pengumpul :Gerobak Sampah Bersekat & sejenisnya	1 m ³	128	640	2 - 3
4	Container Truk	6 m ³ 10 m ³	640 1.375	3.200 5.330	5 - 8
5	TPS				20
	Tipe I	100 m ²	500	2.500	
	Tipe II	±300 m ²	6.000	30.000	
	Tipe III	±1000 m ²	24.000	120.000	
9	Bangunan Pendaur Ulang Sampah Skala Lingkungan	150 m ²	600	3.000	20

Sumber : SNI Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel 5.26 standar peralatan dan kapasitas pelayanan persampahan, maka dilokasi penelitian dengan jumlah penduduk 5.175 jiwa dan 1.035 KK seharusnya di sediakan satu unit container truk dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) type I yaitu terdapat ruang

pemilahan, tempat pemindahan sampah di lengkapi dengan landasan container, serta luas lahan 10 – 50 m².

Adapun persyaratan teknis dalam pengelolaan, tipe, dan tempat pembuangan sampah sementara yaitu :

Klasifikasi Pengelolaan, Tipe Bangunan dan TPS

1. Klasifikasi pengelolaan

Klasifikasi pengelolaan berdasarkan lingkungan permukiman yang ada yaitu :

- a. 1 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 150 – 250 jiwa (30 – 50 rumah)
- b. 1 Rukun Warga : 2.500 jiwa (± 500 rumah)
- c. 1 kelurahan : 30.000 jiwa penduduk (± 6.000 rumah)
- d. 1 kecamatan : 120.000 jiwa (± 24.000 rumah)

2. Klasifikasi tipe bangunan sebagai berikut :

- a. Tipe rumah
 - 1) Mewah yang setara dengan Tipe > 70
 - 2) Sedang yang setara dengan Tipe 45 - 54
 - 3) Sederhana yang setara dengan Tipe 21
- b. Sarana umum/sosial
- c. Bangunan komersial

3. Klasifikasi TPS

Klasifikasi TPS sebagai berikut :

- a. TPS Tipe I

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

 - 1) Ruang pemilahan
 - 2) Gudang
 - 3) Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container
 - 4) Luas lahan ± 10 - 50 m²

b. TPS tipe II

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

- 1) Ruang pemilahan (10 m²)
- 2) Pengomposan sampah organik (200 m²)
- 3) Gudang (50 m²)
- 4) Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²)
- 5) luas lahan ± 60 – 200 m²

c. TPS tipe III

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat

- 1) Ruang pemilahan (30 m²)
- 2) Pengomposan sampah organik (800 m²)
- 3) Gudang (100 m²)
- 4) Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²)
- 5) luas lahan > 200 m²

B. MANFAAT PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN TERHADAP KEGIATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

1. Jaringan Jalan

Jalan sebagai bagian dari bentuk lingkungan sebuah wilayah yang memberikan kontribusi penting terhadap terbentuknya lingkungan sebuah wilayah. Jalan dapat mempengaruhi arah pertumbuhan dan bentuk wilayah, jalan juga memiliki fungsi beragam terhadap mobilitas transportasi dan aktifitas masyarakat. Kualitas jalan dapat mempengaruhi kelancaran aktifitas masyarakat, perekonomian, politik dan budaya. Begitu pentingnya

jaringan jalan tersebut, maka hal ini dapat memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungan Kelurahan Gambesi.

Fungsi jalan dalam kawasan permukiman di lokasi penelitian adalah digunakan untuk keperluan pergerakan masyarakatnya ke berbagai tempat kegiatan sosial ekonomi yaitu untuk mencapai lokasi tempat kerja dan sebaliknya, untuk mengunjungi tempat pembelaanjaan atau pasar, kebutuhan pelajar mencapai sekolah, berinteraksi sosial dengan tetangga, dan untuk mencapai fasilitas kesehatan dan keagamaan.

Tabel 5.27 : Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan

No	Tempat Tujuan	Responden	
		frekwensi	Prosentase (%)
1	Tempat Kerja	71	59,17
2	Pasar	22	25,00
3	Lainnya	11	15,83
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa penggunaan jalan yang terbesar adalah digunakan masyarakat ketempat kerja sebesar 59,17%, mengingat mata pencaharian responden yang lokasinya terletak diluar lingkungan permukiman, 25,00% penggunaan jalan yang digunakan ke pasar untuk berdagang bagi yang bermata pencaharian pedagang atau petani dan nelayan yang ingin menjual langsung hasil kebun/tangkapanya dan bagi warga yang hendak membeli kebutuhan dagangannya. Penggunaan jalan selanjutnya adalah digunakan untuk interaksi sosial seperti berkunjung ke tetangga atau kegiatan lainnya sebesar 15,83%.

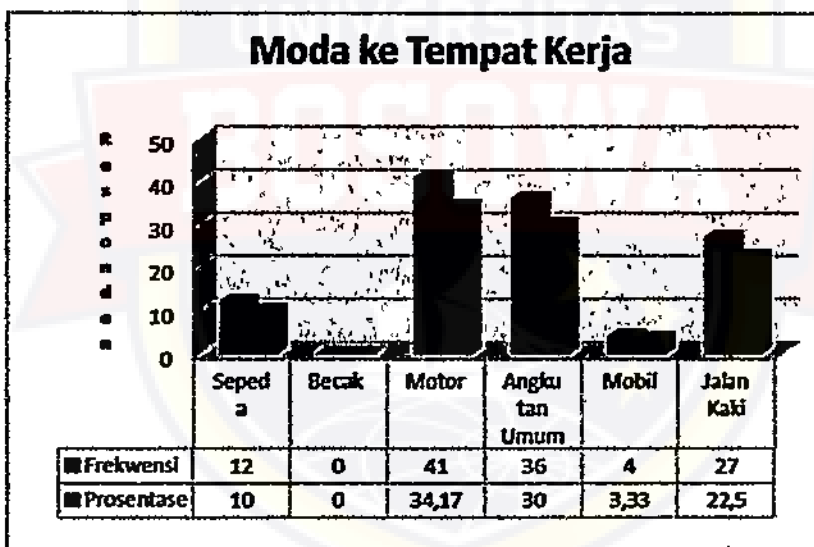


Tabel 5.28. Tujuan Responden Melewati Jalan Lingkungan

No	Sarana ke Tempat Kerja	Responden	
		Frekwensi	Prosentase
1	Sepeda	12	10,00
2	Becak	-	-
3	Motor	41	34,17
4	Angkutan Umum	36	30,00
5	Mobil	4	3,33
6	Jalan Kaki	27	22,50
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Dengan adanya prasara jalan, aktifitas untuk mencapai tempat kegiatan ekonom responden semakin lancar. Ini dilihat dengan menggunakan sarana oleh responden, maka selain berjalan kaki juga menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.



Gambar 5.7 : Prosentase Moda ke Tempat Kerja

Berdasarkan hasil survey, maka jenis kendaraan yang dianggap warga paling sering melintasi jalan dalam kawasan permukiman adalah motor dengan prosentase 34,17% dengan angkutan umum dan berjalan kaki sebesar 30,00 % dan 22,50%,

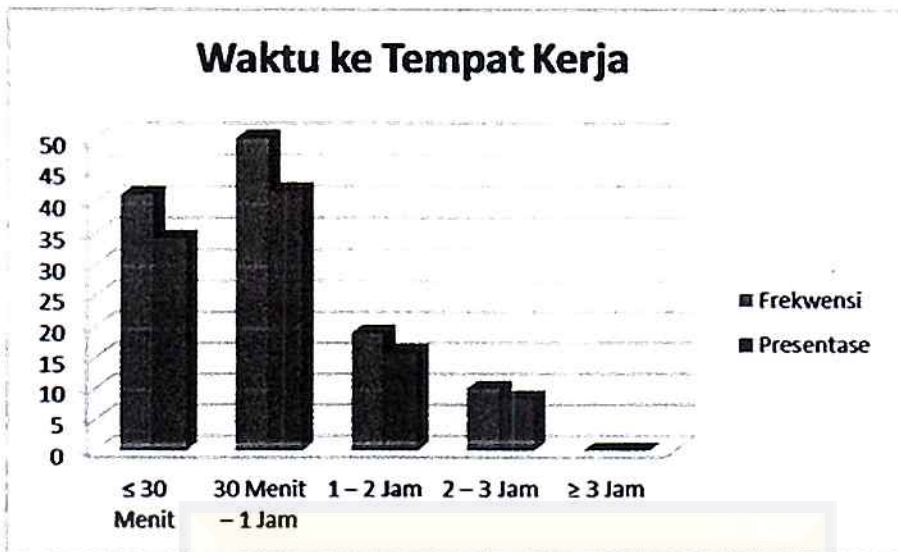
dikarenakan tempat aktifitas mereka dekat dengan kawasan pemukiman sedangkan penggunaan jalan dengan kendaraan mobil hanya 3,33% (tabel 5.28), ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah.

Tabel 5.29. Waktu yang di Gunakan ke tempat Kerja

No	Waktu yang di Perlukan Menuju ke tempat Kerja	Responden	
		Frekwensi	%
1	≤ 30 Menit	41	34,17
2	30 Menit – 1 Jam	50	41,67
3	1 – 2 Jam	19	15,83
4	2 – 3 Jam	10	8,33
5	≥ 3 Jam	0	0
Jumlah		120	100,00

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Sebagai kawasan dengan dominasi aktifitas pertanian dan perikanan, berkaitan dengan keberadaan jaringan jalan, dapat dilihat peran jalan sebagai ruang produksi. Dalam makna luas, ruang produksi adalah bagian wilayah atau bagian jalan yang digunakan untuk jalur distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan sebagai salah satu potensi Kelurahan Gambesi pada umumnya dan lingkungan di sekitar pada khususnya. Bagi penduduk yang bermata pencaharian petani pada musim panen, hasil pertanian dibawa menuju ke pasar yang berdekatan dengan jalan lingkungan, untuk mempermudah distribusi hasil pertanian tersebut untuk dipasarkan ke wilayah lain. Sehingga waktu yang di gunakan untuk menuju ke tempat kerja maupun untuk memasarkan hasil pertanian maupun perikanan sangat menentukan proses dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 5.8 : Prosentase Waktu Yang di perlukan untuk menuju ke tempat kerja

Gambar 5.8 menunjukkan bahwa waktu yang di gunakan ketempat kerja bervariasi mengingat mata pencaharian responden yang berbeda-beda, prosentase terbesar adalah 30 menit sampai 1 jam dengan jumlah 50 responden atau 41,67%, kemudian kurang dari 30 menit sebanyak 41 responden atau 34,17% serta 1 sampai 2 jam sebanyak 19 responden.

Tabel 5.30. Manfaat Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Kegiatan sosial Responden

No	Kegiatan Sosial Responden	Sering		Jarang		Tidak Pernah		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Berhub. Dengan Kel. & Kerabat di luar Lingk. Permukiman	47	39,17	51	42,50	22	18,33	120
2	Berhub. Dengan Kel. & Kerabat di dalam Lingk. Permukiman	78	65,00	33	27,50	9	7,50	120
3	Mengikuti acara Hajatan	97	80,83	23	19,17	0	0	120

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Manfaat keberadaan prasaran jalan dalam lingkungan permukiman terhadap kegiatan sosial (tabel 5.30) adalah kegiatan berinteraksi dengan keluarga dekat dan kerabat yang berada diluar lingkungan permukiman menunjukkan bahwa 39,17% sering

bertemu dan 42,50% jarang bertemu. Untuk kegiatan berinteraksi dengan keluarga dekat atau kerabat dalam lingkungan permukiman 65,00% sering bertemu, ini menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana jalan dalam lingkungan permukiman memberi manfaat terhadap interaksi warga dalam lingkungan permukiman. Untuk kegiatan mengikuti acara hajatan 80,83% responden dapat menghadiri kegiatan dalam lingkungan permukiman telah dilalui jaringan jalan.

Manfaat lain dengan ketersediaan prasarana jalan dalam lingkungan permukiman adalah memberi peluang kepada warga dalam peningkatan pendapatan dengan membuka usaha angkutan ojek untuk sarana transportasi warga dari dan keluar lingkungan permukiman.

Tabel 5.31. Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Tingkat Pendapatan

No	Keberadaan Prasarana Jalan Terhadap Tingkat Pendapatan	Responden	
		Frekuensi	Prosentase
1	Meningkat	54	45,38
2	Sedang	48	40,37
3	Tidak Meningkatkan	18	14,29
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2011

Tabel 5.31 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan warga masyarakat setelah adanya prasarana jalan. Hal ini sesuai wawancara dengan responden, bahwa dengan adanya prasarana jalan untuk kelancaran transportasi lalu lintas dan perekonomian warga masyarakat sangat terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga. Ini dapat dilihat bahwa 45,38% menyatakan dengan adanya prasarana jalan dapat meningkatkan pendapatannya.

Penataan lingkungan permukiman nelayan di lokasi penelitian di arahkan melalui pengembangan infrastruktur jalan pada jalan-jalan lingkungan (lokal sekunder) yang sebagian besar telah rusak dan masih jalan tanah. Pengembangannya diarahkan untuk menghubungkan obyek-obyek antar pusat kegiatan Kelurahan Gambesi. Rencana pengembangan jaringan jalan dilakukan dalam bentuk penimbunan jalan, perkerasan sirtu, pembuatan plat dekker dan paving blok disesuaikan dengan kondisi jalan.

2. Jaringan Drainase

Jaringan drainase merupakan bagian penting dari kualitas lingkungan. Pemahaman tentang drainase tidak dapat dilepaskan dari jaringan drainase sebagai sebuah sistem. Karena aliran air akan berkaitan dengan wilayah yang lebih luas. Kegagalan sistem drainase merupakan salah satu variabel terbentuknya wilayah kumuh, dan keberhasilan sistem drainase mempengaruhi terbentuknya kesehatan lingkungan. Seperti jaringan jalan, sistem drainase memiliki tingkat kelas. Di dalam sistem tata ruang dikenal saluran drainase primer, drainase sekunder dan tersier. Tingkat jaringan drainase menggambarkan keberadaannya dan pelayanannya di dalam sebuah wilayah. Drainase primer adalah saluran utama wilayah, diikuti dengan drainase sekunder, sebagai saluran lebih kecil dan bermuara di saluran primer, demikian pula dengan saluran tersier akan bermuara di saluran sekunder, dan

seferusnya. Letak saluran tersebut dipengaruhi oleh kepadatan lingkungan terbangun. Maka apabila lingkungan tersebut padat terbangun, akan terdapat banyak saluran primer, sekunder dan tersier. Sebaliknya apabila lingkungan dengan kepadatan rendah, maka kelas jaringan saluran drainase akan menyesuaikan.

Pelayanan saluran drainase di lingkungan permukiman, pada kedua dusun sudah mencukupi, tetapi permasalahan terbesar adalah saluran buatan yang memiliki kelas saluran sekunder dan tersier. Kedua saluran tersebut memiliki bentuk, kualitas dan dimensi yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan permukiman dan sistem drainase Kelurahan Gambesi. Banyak sekali saluran drainase yang memiliki dimensi lebar kecil dan dangkal sehingga tidak dapat menampung debit air cukup besar sehingga banyak air meluap ketika hujan lebat. Selain air hujan, aliran air yang deras tidak dapat ditampung dengan baik oleh saluran drainase tersebut. Aliran air dari utara menggunakan gravitasi karena secara topografi kondisi tanah menurun dengan tajam, sehingga banyak air yang meluap dan menggenang di beberapa bagian.

3. Air Bersih

Aktivitas warga masyarakat dalam suatu kawasan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor komponen fisik lingkungan. Diantaranya yang turut mempengaruhinya adalah prasarana air bersih, yang dapat mendukung dan meningkatkan mutu lingkungan kehidupan masyarakat dikawasan permukiman.

Air bersih sebagai kebutuhan pokok dalam lingkungan permukiman di lokasi penelitian belum dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, dimana baru 9,17% responden yang menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih.

Dari hasil survey di lokasi penelitian menunjukkan bahwa air yang bersih yang diperoleh dari sambungan rumah PDAM dipergunakan warga menunjukkan bahwa dari setiap rata-rata dari 120 responden baru 11 atau 9,17% memanfaatkan air bersih untuk kegiatan rumah tangga seperti masak, mandi maupun mencuci. Pemakaian air perhari dalam lingkungan permukiman bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa factor antar lain jumlah penghuni dalam setiap rumah dan jenis kegiatan/aktivitas warga.

Tabel 5.32. Rata-Rata Pemakaian Air/hari dari Responden

No	Rata-Rata Pemakaian Setiap Hari	Jumlah	
		Responden	Prosentase
1	Kurang dari 100 Litre	48	40,00
2	100 - 200 Liter	27	22,50
3	200 - 300 Liter	40	33,33
4	Lebih dari 300 Liter	5	4,17
	Jumlah	120	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Air Bersih yang dikonsumsi oleh warga masyarakat pada lokasi penelitian kualitasnya sudah baik (tabel 5.33), sehingga mereka tidak mudah diserang penyakit. Biasanya pada musim tertentu saja warga masyarakat diserang penyakit. Penyakit yang sering diderita adalah penyakit pemapasan, penyakit kulit dan penyakit diare. Tanggapan Responden mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.33: Tanggapan Responden Yang Pernah Diserang Penyakit Terhadap Kualitas Air

No	Kualitas Air	Pernah Terserang Penyakit						Jumlah	
		Sering		Jarang		Tidak Pernah		N	%
		N	%	N	%	N	%		
1	Baik	0	0	17	18,09	77	81,91	94	78,33
2	Kurang Baik	4	15,38	10	38,46	12	46,15	26	21,67
	Jumlah	4	3,33	27	22,50	89	74,17	120	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

Dalam table 5.33 tampak bahwa pernyataan responden yang menyatakan tidak pernah terserang penyakit mencapai 74,17% sedangkan yang menyatakan sering hanya 3,33%. Indikasi yang dapat dikemukakan bahwa kualitas air bersih masyarakat kurang higienia, namun karena sudah biasa mengkonsumsi air sumur, sudah tidak terpengaruh terhadap kesehatan mereka. Juga karena prasarana air bersih yang dimiliki warga masyarakat yang dekat dengan pantai sehingga kualitas air bersih tidak dapat dijamin bebas dari penyakit.

4. Sanitasi Lingkungan

Pemmasalahan sistem sanitasi dan persampahan berkaitan erat dengan perilaku warga dalam pengelolaan sistem tersebut. Keterbatasan sarana pendukung dan kemampuan ekonomi warga menjadikan pemicu terjadinya permasalahan sanitasi dan persampahan, sehingga menimbulkan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Sebagian besar warga di lokasi penelitian tidak memiliki sistem sanitasi yang baik. Kepemilikan jamban tidak dilengkapi dengan jaringan sanitasi dan septictank, sehingga limbah rumah tangga terbuang melalui saluran drainase secara



langsung dan bahkan dibuang di pekarangan kosong maupun yang menuju ke sungai atau empang sehingga terjadi genangan limbah rumah tangga.

a. Air Limbah

Pengelolaan air limbah merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik dalam lingkungan permukiman juga pada lingkungan permukiman di lokasi penelitian. Air Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Dari hasil survey dan analisis data dilokasi penelitian menunjukkan bahwa untuk pembuangan limbah cair dan padat dari 120 responden 43 diantaranya atau 35,83% responden membuang limbah cair dan padat ke selokan, sementara yang membuang limbah cair dan padat ke tanah kosong itu sekitar 38 responden (31,67%), sedangkan yang memiliki sistem pembuangan limbah cair dan padat hanya 27 responden yang menggunakan sistem pengolahan limbah cair (septictank) di rumahnya, dan selebihnya yaitu 10,00% yang membuang ke wc umum dan empang.

Tabel 5.34: Sistem Pembuangan Limbah Cair dan Padat di Lokasi Penelitian

NO	Kondisi Prasarana Pembuangan Limbah Padat	Responden	
		Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Selokan	43	35,83
2	Sepfik Tank	27	22,50
3	Tanah Kosong	38	31,67
4	Empang	5	4,17
5	Rawa-Rawa	-	-
6	Wc Umum	7	5,83
JUMLAH		120	100,00

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner 2014

Pada lokasi penelitian, masyarakat pada daerah tersebut juga di sediakan prasarana MCK umum, prasarana ini disediakan bagi masyarakat yang tidak memiliki prasarana jamban keluarga di rumahnya, sesuai pengamatan dilapangan masyarakat yang tidak memiliki MCK sendiri umumnya menggunakan MCK Umum. Untuk mengetahui kondisi MCK umum, tabel berikut menunjukkan tanggapan responden.

Tabel 5.35: Penilaian Responden Terhadap Kondisi MCK Umum

No	Kondisi Prasarana MCK Umum	Responden	
		frekwensi	Prosentase (%)
1	Rusak	27	22,50
2	Masih Layak Pakai	29	24,17
3	Baik	25	20,83
4	Tidak Tersedia Air Bersih	39	32,50
	Jumlah	120	100,00

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner 2014

Berdasarkan tabel 5.35 diatas diketahui bahwa responden menanggapi kondisi prasarana MCK umum tidak tersedia air bersih 32,50%, sedangkan yang rusak hanya 22,50%. Selain itu terdapat 24,17% responden menyatakan bahwa kondisi MCK umum masih layak pakai. Ini menunjukkan bahwa kondisi MCK umum di kategorikan masih layak pakai, cuman yang perlu diperhatikan adalah prasarana air bersih untuk MCK tersebut. Selain itu, tampak pula di lokasi penelitian masih ada warga masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri, khususnya warga masyarakat yang tinggal dekat pesisir pantai.

Dalam hal ini, secara teoritik konsepsional suatu kawasan permukiman dikatakan layak huni apabila setiap keluarga



memiliki prasarana sanitasi (WC) yang memenuhi syarat-syarat teknis seperti konstruksi, ukuran dan kedalaman serta jaraknya dari sumber air minimal 10 meter untuk yang menggunakan septiktank sebagai tempat peresapan.

Pada Lokasi penelitian, warga masyarakat yang tidak memiliki MCK sendiri secara dominan disebabkan oleh factor ekonom (keterbatasan dana untuk pengadaan prasarana MCK), faktor lahan yang tidak ada maupun karena faktor penggunaan dan pemeliharaan susah. Juga karena factor tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak tahu dengan membuang tinja pada WC umum yang kondisinya tidak layak dan sumber air tidak ada. Olehnya itu perencanaan ke depan perlu di perbanyak prasarana MCK umum dengan sistem septik tank komunal.

Untuk limbah cair yang berasal dari ruah tangga, sesuai pengamatan di lapangan dibuang oleh masyarakat dengan memanfaatkan saluran yang ada didepan rumah, baik saluran yang permanen maupun saluran tanah,

Tabel 5.36: Alasan Sehingga Belum Memiliki MCK Sendiri dari Responden

No	Alasan belum memiliki MCK sendiri	Jumlah	
		N	%
1	Tidak Ada Biaya	7	46,67
2	Tidak Ada Tempat	6	40,00
3	Penggunaan dan Pemeliharaan Susah	2	13,33
Jumlah		15	100

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014

b. Prasarana Persampahan

Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat, timbunan sampah juga ikut meningkat tajam dan berpotensi mencemari lingkungan. Disisi lain fasilitas, kapasitas dan kinerja aparat pengelola sampah masih terbatas. Tingkat kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah juga masih tergolong rendah dimana paradigma lama (kumpul, angkut, buang) masih melekat cukup kuat sulit dirubah.

Kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih memang mutlak dimiliki oleh setiap orang. dengan tingkat kesadaran yang baik, paling tidak bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat sampah.

Sesuai hasil survey menunjukkan bahwa warga di lokasi penelitian hanya sebagian yang membuang sampah pada wadah pengumpulan berupa tempat pembuangan sementara (TPS), dan sebagian lagi membuang sampah di saluran drainase, dipesisir pantai dan dilahan kosong disekitar tempat tinggal warga.

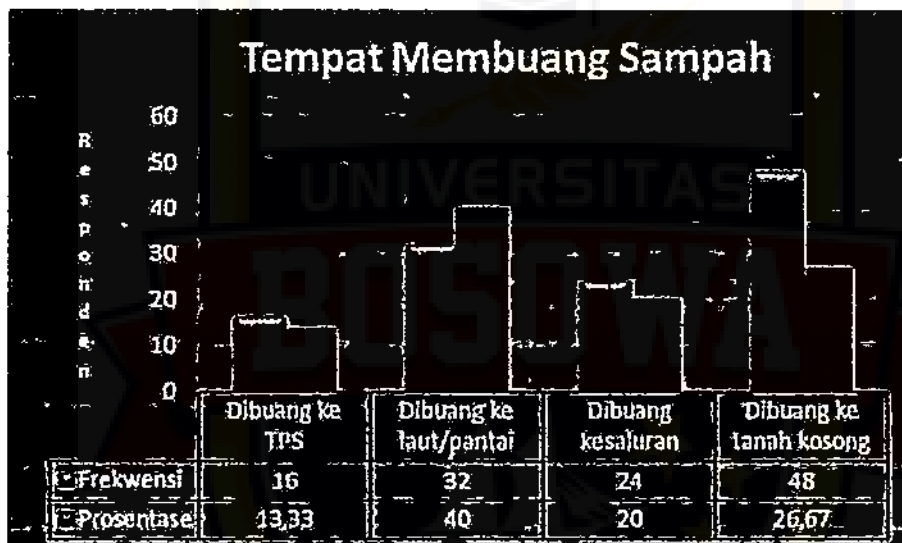
Dari tabel 5.37 di bawah ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 44 responden atau 42,31% masyarakat membuang sampahnya ke laut/pantai, hal ini berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian sebagai nelayan serta posisi rumah yang berada di atas air. Sistem pembuangan

sampah juga di pengaruhi oleh faktor tingkat kesadaran masyarakat, hal ini terlihat bahwa di lokasi penelitian, 28 responden (26,92%) masyarakat membuang sampahnya di tanah/lahan yang kosong yang merupakan area publik

Tabel 5.37 : Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Sampah

No	Cara Pengelolaan tempat sampah/rumah/tangga	Frekwensi	Prosentase
1	Dibuang ke TPS	16	13,33
2	Dibuang ke laut/pantai	32	40,00
3	Dibuang kesaluran	24	20,00
4	Dibuang ke tanah kosong	48	26,67
Jumlah		120	100,00

Sumber : Hasil Olahan Kuisisioner 2014



Gambar 5.9 : Distribusi Tempat Pembuangan Sampah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan terhadap ketersediaan dan manfaat penyediaan prasarana dan sarana permukiman di Kelurahan Gambesi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan prasarana permukiman di Kelurahan Gambesi sebagai lokasi penelitian berupa jalan, jaringan drainase, air bersih, sanitasi lingkungan, dan sistem persampahan secara kuantitas dapat di kategorikan masih kurang memadai, sehingga memerlukan peningkatan kualitas terutama untuk prasarana jalan, dan drainase, pengadaan jaringan limbah cair rumah tangga, dan septiltank, pengadaan MCK umum dan perbaikan sistem persampahan serta air bersih PDAM. Peningkatan kualitas jalan dan drainase serta perbaikan prasarana utilitas lainnya sangat menunjang aktivitas kegiatan di masyarakat terutama masyarakat yang ada di lokasi penelitian.
2. Manfaat penyediaan prasarana lingkungan permukiman terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat adalah :
 - a. Manfaat prasarana dan sarana lingkungan permukiman terhadap aspek ekonomi adalah dengan adanya sistem jaringan jalan yang baik, maka aksesibilitas dan sirkulasi dari dan

ketempat kerja serta akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat yang lancar otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

- b. Manfaat prasarana yang ada terkait dengan aspek sosial sangat mempengaruhi terhadap pola kehidupan dan interaksi sosial di masyarakat.
3. Ketersediaan dan manfaat penyediaan prasarana lingkungan permukiman di lokasi penelitian sangat di perlukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan akses vitalitas ekonomi dan infrastruktur dasar permukiman.

B. Saran

Dalam sistem penyediaan prasarana lingkungan permukiman maka di harapkan :

1. Diperlukan peningkatan kualitas jaringan jalan pada beberapa ruas jalan berupa pengaspalan dan pemasangan paving blok yang belum ada dan yang butuh perbaikan.
2. Agar pemerintah Kota Temate mengupayakan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk interaksi sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, E, 1997 Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Alumni, Bandung*
- Daldjoeni, 1996, Geografi Kota dan Desa, Alumni, Bandung*
- Jayadinata, J.T. 1999, Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perkotaan Wilayah, ITB, Bandung
- Khairuddin, 1992, Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan, Liberty, Yogyakarta
- Komaruddin, 1997, Menelusuri Pembangunan perumahan dan Permukiman, Yayasan Real State Indonesia, Jakarta.
- Koestoer. 2011, Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Universitas Indonesia, Jakarta
- Singarimbun, dan Effendi. 1989. Teknik Analisis Metode Penelitian. Andy Yogyakarta
- Sinulingga, D.B, 1999, Pembangunan Kota " Tinjauan Regional dan Lokal" Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sobirin, 2001. Distribusi Permukiman dan Wilayah Kota, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sugyono, 2001, Metodologi Penelitian I, Yudhistira, Surabaya
- Sugandhi, 2002, Pembangunan Wilayah Sehubungan Dengan Tata Guna Tanah, Erlangga, Jakarta
-Biro Pusat Statistik Kota Temate, Tahun 2013
-Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001:7 Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001:7
-Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah



-Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah
-Kepmen PU No. 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman dan Pengembangan Wilayah tahun 2000 dan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-6981-2004)
-Pekerjaan Umum, Sebagai Pilar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2011.
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

